



DOKUMEN INDEKS PEMULIHAN PASCA ERUPSI SEMERU 2021

Strategi Pemulihan “Lebih Baik”



Daftar Isi

A.	Pendahuluan	2
1.	Profil wilayah	2
	Kawasan Rawan Bencana III	18
	Kawasan Rawan Bencana II	18
	Kawasan Rawan Bencana I	18
2.	Histori kejadian	19
3.	Program Pemulihan Pasca Bencana	20
B.	Evaluasi dan Indeks Pemulihan	33
1.	Metodologi	33
2.	Evaluasi Program (program terlaksana/belum, penyebabnya)	39
1.	ASPEK PENDIDIKAN	45
2.	Aspek KESEHATAN	46
3.	ASPEK EKONOMI	47
3.	Mekanisme Koping	51
4.	Indeks Pemulihan	52
C.	Progres Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	55
D.	Rekomendasi Program Pemulihan	57
E.	Penutup	61

A. Pendahuluan

1. Profil wilayah

a. Kondisi Geografis

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Lumajang terletak kurang lebih 154 km ke arah sebelah timur Kota Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur yang terhampar pada posisi antara 1120 50'-1130 22' Bujur Timur dan "70 52' – 80 23'" Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu: Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Rowokangkung, Tekung, Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit, Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Lumajang memiliki luas 1.790,90 km², dengan wilayah yang terluas di Kecamatan Senduro dan Pasirian masing-masing luasan 12,77 % dan 10,27 % dari luas wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk lebih jelasnya mengenai luas masing-masing wilayah kecamatan dan persentase luas kecamatan terhadap wilayah kabupaten Lumajang dapat dilihat tabel dan gambar berikut Lumajang dapat dilihat tabel dan gambar berikut.

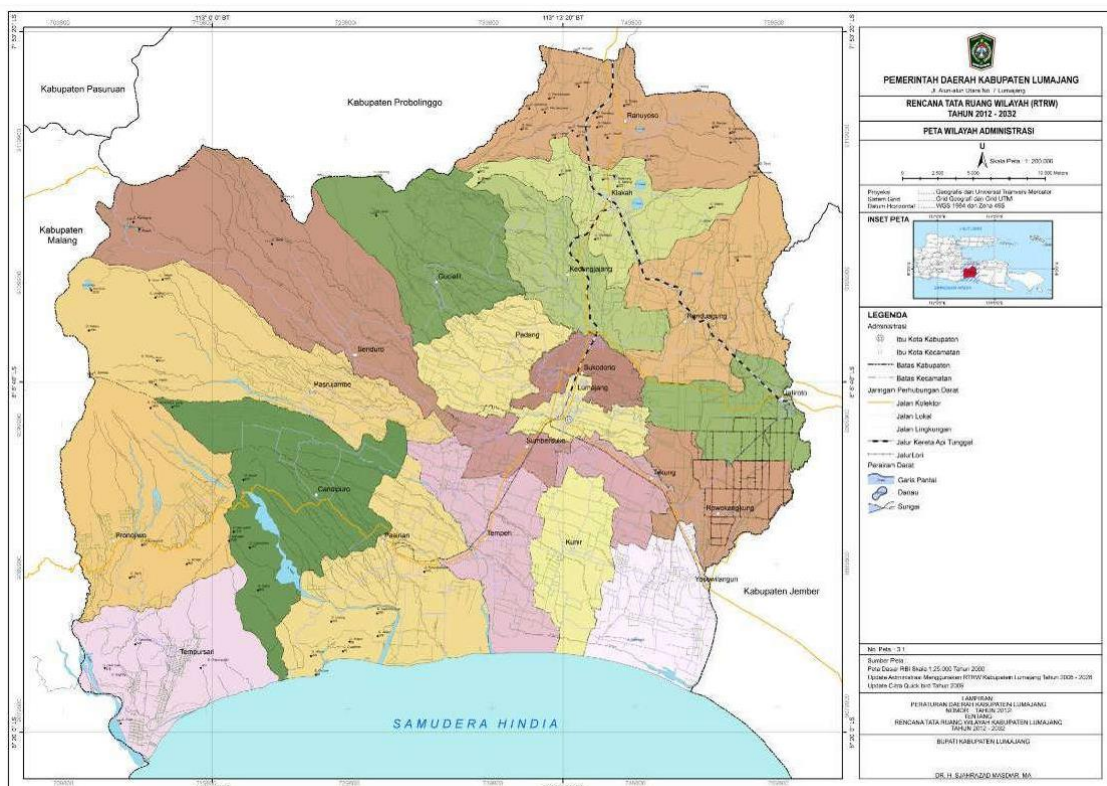
Tabel 1

Luas dan Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Tempursari	101,36	5,66
2	Pronojiwo	38,74	2,16
3	Candipuro	144,93	8,09
4	Pasirian	183,91	10,27
5	Tempeh	88,05	4,92
6	Lumajang	30,26	1,69

7	Sumbersuko	26,54	1,48
8	Tekung	30,40	1,70
9	Kunir	50,18	2,80
10	Yosowilangun	81,30	4,54
11	Rowokangkung	77,95	4,35
12	Jatiroto	77,06	4,30
13	Randuagung	103,41	5,77
14	Sukodono	30,79	1,72
15	Padang	52,79	2,95
16	Pasrujambe	97,30	5,43
17	Senduro	228,68	12,77
18	Gucialit	72,83	4,07
19	Kedungjajang	92,33	5,16
20	Klakah	83,67	4,67
21	Ranuyoso	98,42	5,50
JUMLAH		1.790,90	100,00

Sumber : RPJPD Kab. Lumajang Tahun 2005-2025



Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

b. Gambaran Demografi

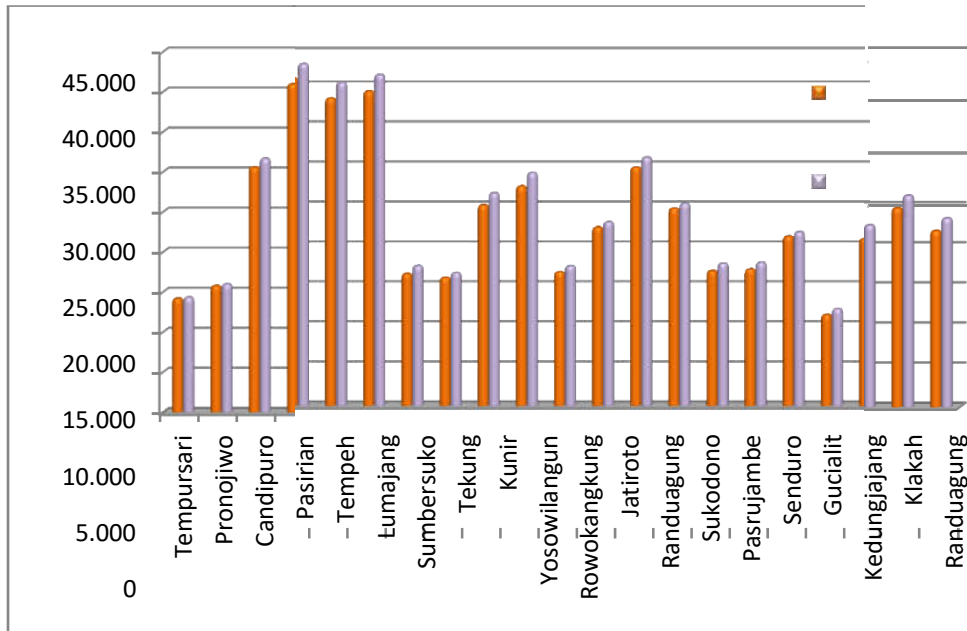
Penduduk Kabupaten Lumajang tersebar merata di seluruh kecamatan dimana distribusi penduduk terbesar di Kecamatan Pasirian dengan 84.431 jiwa, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Gucialit dengan 23.448 jiwa. Gambaran mengenai jumlah penduduk dan distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Lumajang sebagaimana tabel dan grafik berikut.

Tabel 2

Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tempursari	14.016	14.227	28.243
2	Pronojiwo	15.747	16.018	31.765
3	Candipuro	30.534	32.002	62.536
4	Pasirian	41.202	43.229	84.431
5	Tempeh	38.773	40.836	79.609
6	Lumajang	39.370	41.733	81.103
7	Sumbersuko	16.531	17.741	34.272
8	Tekung	16.126	16.762	32.888
9	Kunir	25.231	26.878	52.109
10	Yosowilangun	27.414	29.225	56.639
11	Rowokangkung	16.667	17.526	34.193
12	Jatiroto	22.496	23.239	45.735
13	Randuagung	29.976	31.327	61.303
14	Sukodono	25.186	25.874	51.060
15	Padang	16.961	17.990	34.951
16	Pasrujambe	17.103	18.068	35.171
17	Senduro	21.394	21.959	43.353
18	Gucialit	11.338	12.110	23.448
19	Kedungjajang	21.189	23.166	44.355
20	Klakah	24.854	26.613	51.467
21	Ranuyoso	22.116	23.878	45.994
Jumlah		494.224	520.401	1.014.625

Sumber : Kabupaten Lumajang dalam Angka, 2013



Gambar 2. Penduduk Berdasarkan Distribusi Penduduk

Keterbatasan masyarakat dalam pengetahuan akademik akan berpengaruh terhadap tingkat penghasilan dan mata pencaharian nantinya. Berikut adalah berdasarkan mata pencaharian tahun 2010.

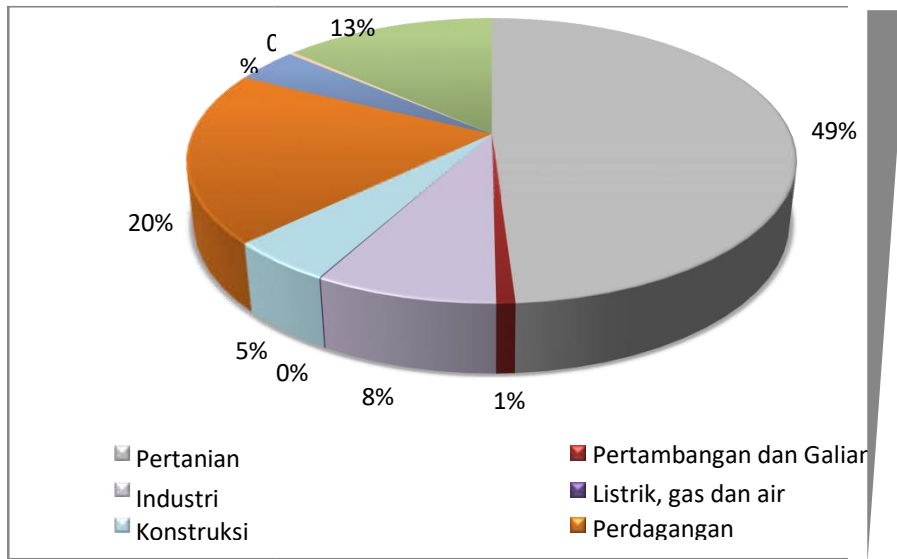
Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Utama Tahun 2010

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Prosentase
1	Pertanian	231.945	48,97
2	Pertambangan dan Galian	3.979	0,84
3	Industri	38.602	8,15
4	Listrik, gas dan air	284	0,06
5	Konstruksi	22.735	4,8
6	Perdagangan	92.077	19,44
7	Transport dan Komunikasi	19.135	4,04
8	Keuangan	1.563	0,33

9	Jasa	63.327	13,37
	JUMLAH	473.648	100

Sumber : ASPM Lumajang 2011



Gambar 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Mata pencaharian penduduk didominasi oleh lapangan usaha pertanian sebesar 231.945 jiwa atau sekitar 48,97 % dan Perdagangan sebanyak 92.077 jiwa atau sebesar 19,44 %. Sedangkan jumlah penduduk dengan mata pencaharian terkecil terkecil adalah dalam bidang lapangan usaha keuangan dan listrik, gas dan air sekitar 0,33 % dan 0,06 %. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan kesejahteraan kelompok di Kabupaten Lumajang tahun 2011- 2012, sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 4

Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kesejahteraan di Kabupaten Lumajang Tahun 2011- 2012

No	Kelompok Masyarakat	Jumlah		Naik/Turun %
		2011	2012	
1	Pra Sejahtera	41.391	39.595	Turun
2	Sejahtera I	63.042	62.648	Turun
3	Sejahtera	203.017	210.792	Naik

4	Total	307.450	313.035	Naik
---	-------	---------	---------	------

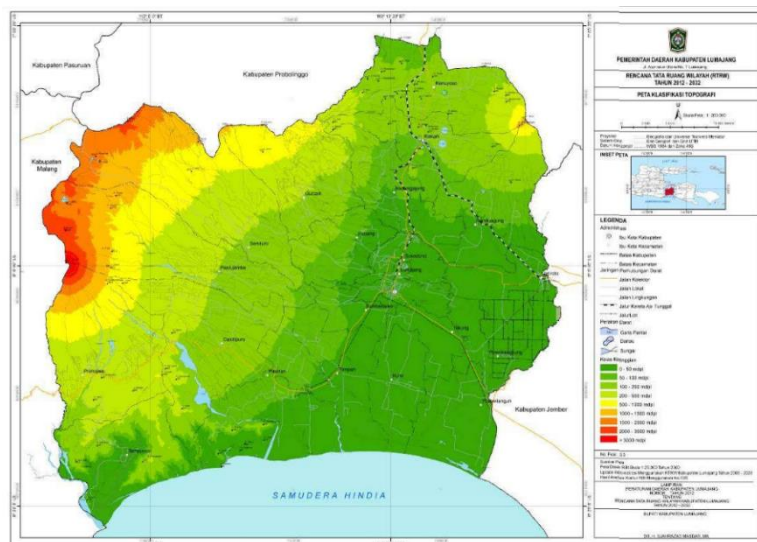
Sumber : Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang, 2011

c. Gambaran Topografi

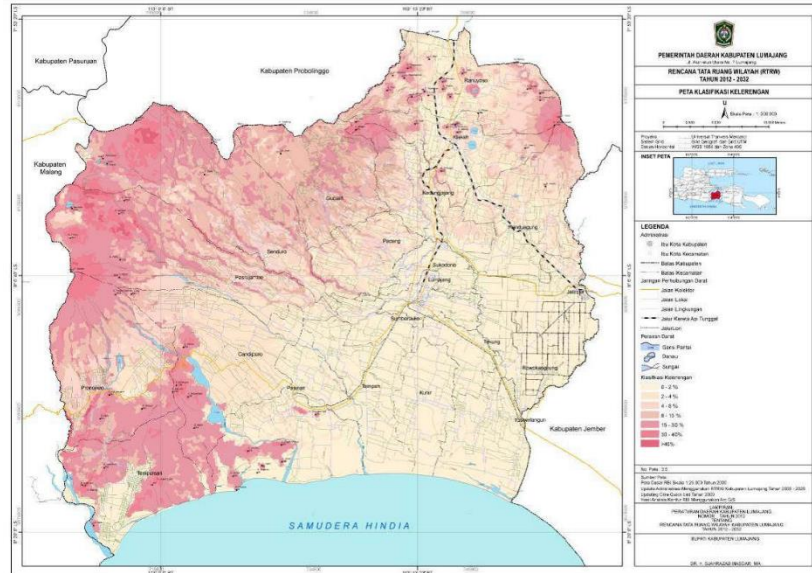
Secara topografis wilayah Kabupaten Lumajang terdiri dari daratan yang subur, karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 m), Gunung Bromo (3.292 m) dan Gunung Lamongan. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 hingga 3.676 m di atas permukaan laut. Daerah terluas ada pada ketinggian 100 hingga 500 m di atas permukaan laut, yaitu seluas 63.405,50 Ha atau sebesar 35,88% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang, sedangkan daerah tersempit ada pada ketinggian antara >2.000 m dari yaitu seluas 6.889,40 Ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten kemiringan wilayah Kabupaten Lumajang terdiri:

- Lahan dengan kemiringan 0 – 15 % : 10.643,80 Ha
- Lahan dengan kemiringan 15 -25 % : 176,00 Ha
- Lahan dengan kemiringan 25 – 40 % : 476,00 Ha
- Lahan dengan kemiringan > 40 % : 3.011.80 Ha

Gambaran Topografi Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut.



Gambar 4. Peta Ketinggian Kabupaten Lumajang



Gambar 5. Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Lumajang

d. Gambaran Geohidrologi

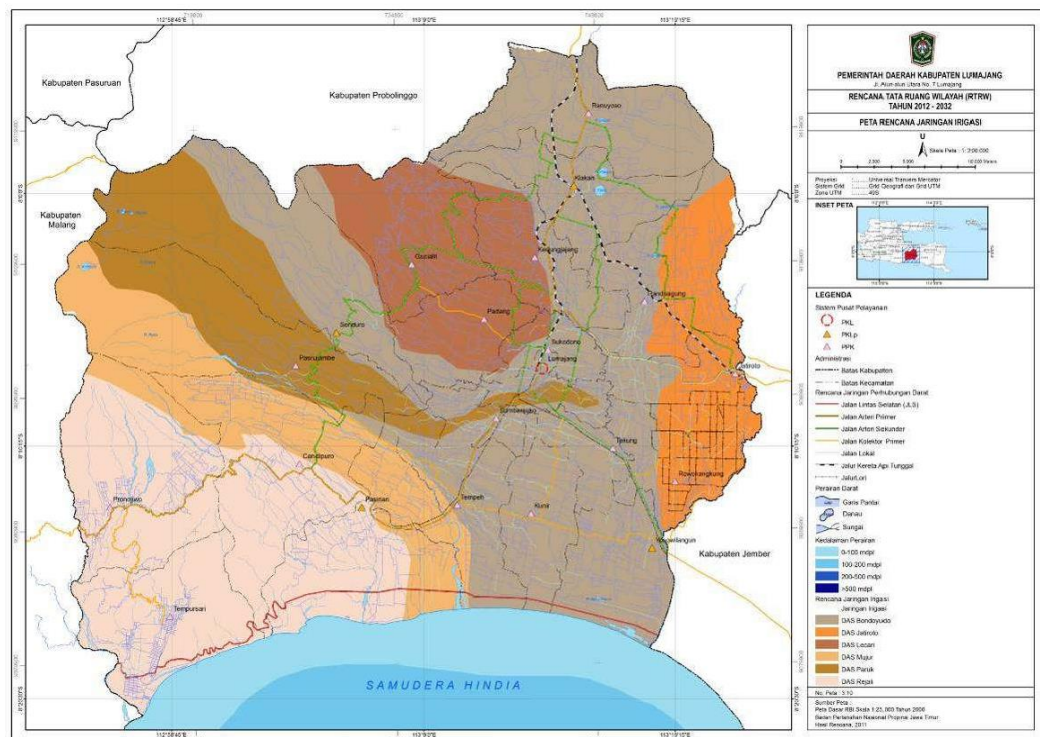
e. Untuk kawasan selatan daerahnya juga merupakan daerah sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai-sungai yang mengalirnya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali Mujur dan Bondoyudo. Kondisi Hidrologi wilayah Kabupaten Lumajang sendiri merupakan bagian hilir dari 6 Daerah Aliran Sungai (DAS), antara lain:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bondoyudo
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wotgalih
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Mujur
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Rejali
5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Dampar
6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Gede
7. Daerah Aliran Sungai (DAS) Welang
8. Daerah Aliran Sungai (DAS) Tempurejo Hulu
9. Daerah Aliran Sungai (DAS) Tempurejo Hilir
10. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulurejo Hulu
11. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulurejo Tengah
12. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulurejo Hilir

13. Daerah Aliran Sungai (DAS) Rawaan

14. Daerah Aliran Sungai (DAS) Glidik

Sebagian besar sungai utama di Kabupaten Lumajang mengalir ke Samudera Indonesia. Kabupaten Lumajang memiliki 46 sungai, 369 dam, 254 pompa air dan 6 air terjun, selain itu juga terdapat danau/ranu yang potensial seperti Ranu Pakis, Ranu Klakah dll. Potensi hidrografi telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, industri dan pariwisata. Terdapat beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Lumajang yaitu di Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Kali Rejali, Besuk Sat, Kali Mujur dan Bondoyudo. Pengelolaan sungai di Kabupaten Lumajang dilakukan oleh dua instansi yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Bondoyudo – Mayang yang merupakan UPT Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur di Lumajang yang mengelola jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan luas 1000 – 3000 Ha atau daerah irigasi < 1000 Ha yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten dengan luas < 1000 Ha dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang. Berikut adalah nama dan debit sungai di Kabupaten Lumajang:



Gambar 6. Peta Hidrologi Kabupaten Lumajang

Pengelolaan sungai di Kabupaten Lumajang dilakukan oleh dua instansi yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Bondoyudo-Mayang yang merupakan UPT Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa

Timur di Lumajang yang mengelola jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan luas 1000-3000 Ha atau daerah irigasi < 1000 Ha yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten dengan luas < 1000 Ha dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang. Berikut adalah nama dan debit sungai di Kabupaten Lumajang

Tabel 5

Nama Sungai dan Debit rata-rata Sungai yang Dikelola Balai PSAWS Bondoyudo-Mayang di Kabupaten Lumajang

No	Sungai	Lokasi	Debit Rata-Rata Per Tahun
1	Kaliasem	Mojosari - Summersuko	3,809.08
2	Curah Menjangan	Banjarwaru – Lumajang	3,764.42
3	Kali Jatiroto	Kaliboto - Jatiroto	8,189.42
4	Bondoyudo	Tekung – Tekung	8,336.00
5	Bondoyudo	Banyuputih Kidu – Jatiroto	16,374.83
6	Curah Menjangan	Sentul - Summersuko	9,046.00

Sumber: Dinas PU Kab. Lumajang, 2011

Tabel 6

Nama sungai dan Debit Sungai di Kabupaten Lumajang

No.	Nama Kali/Sungai	Debit (m ³ /detik)	
		Kemarau	Hujan
1	Bondoyudo	16.268,00	35.141,00
2	Bodang	125,00	250,00
3	Curah Menjangan	3.200,00	5.885,00
4	Kajaran	500,00	2.000,00
5	Kressek	600,00	1.900,00
6	Grobogan	1.000,00	5.000,00
7	Paleran	1.500,00	4.000,00
8	Umbul Pring Tali	950,00	4.500,00
9	Jatiroto	2.717,00	7.519,00
10	Batu Lubang	7.000,00	3.250,00

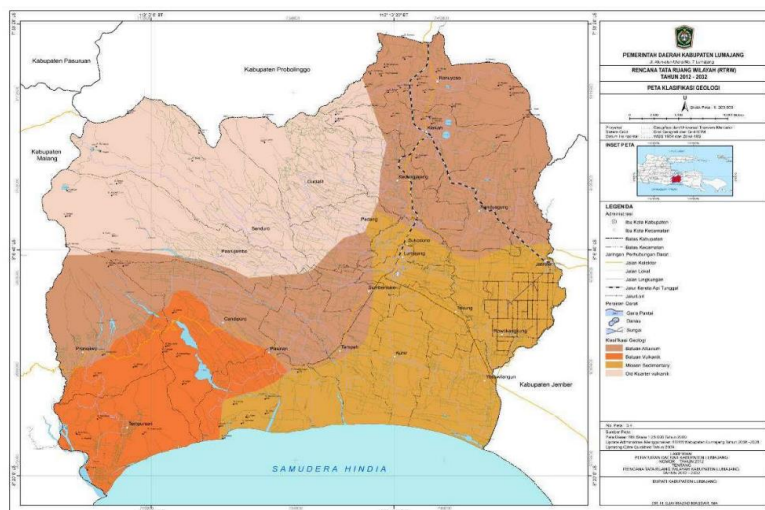
11	Boto	2.492,00	2.717,00
12	Banter	1.250,00	2.550,00
13	Dilem	320,00	525,00
14	Blukon	461,00	1.746,00
15	Asem/Laban	409,00	13.931,00
16	Betoto	300,00	774,00
17	Ireng-ireng	3.500,00	7.500,00
18	Lateng	7.500,00	13.200,00
19	Pakel	150,00	250,00
20	Krai	1.000,00	11.000,00
21	Mujur	300,00	7.790,00
22	Tunggeng	60,00	250,00
23	Besuk Tempeh	40,00	400,00
24	Poh	25,00	90,00
25	Klatakan	200,00	1.000,00
26	Besuk Sat	4.650,00	7.000,00
27	Pancing	1.000,00	2.100,00
28	Besuk Semut	300,00	750,00
29	Durek	3.540,00	10.250,00
30	Rejali	6.500,00	12.000,00
31	Wuluh	1.050,00	4.800,00
32	Krumbang	30,00	3.200,00
33	Regoyo	50,00	3.800,00
34	Gede	2.700,00	6.000,00
35	Welang	600,00	2.000,00
36	Dampar	2.000,00	6.000,00
37	Rawaan	1.000,00	11.000,00
38	Glidik	1.500,00	13.000,00
39	Lenkong	1.200,00	2.500,00
40	Besuk Bang	975,00	2.900,00

f. Gambaran Geologi

Kabupaten Lumajang secara Geologis terbentuk dari 4 jenis bahan induk batuan yaitu Batuan Alluvium, Batuan Vulkanik, *Miosen Sedimentary* dan *Old Kurter Vulkanik*. *Miosen Sedimentary* terbentuk dengan fisiografi yang relatif datar dimana terdapat pada bagian timur dan selatan. Sedangkan Batuan Alluvium, Batuan Vulkanik dan *Old Quarter Vulkanik* terbentuk dengan fisiografi dataran tinggi, pegunungan serta akibat letusan gunung berapi. Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang dikelompokkan menjadi 10 jenis tanah meliputi:

- Asosiasi andosol coklat kekuningan dan regosol coklat kekuningan
- Komplek mediteran merah dan litosol
- Alluvial coklat kekelabuan
- Alluvial hidro mort
- Asosiasi aluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan
- Asosiasi glei humus rendah dan aluvial kelabu
- Regosol kelabu
- Komplek regosol kelabu dan litosol
- Komplek regosol dan litosol Komplek latosol kemerahan dan litosol

Gambar 7. Peta Geologi Kabupaten Lumajang



g. Gambaran Klimatologi

Untuk Klimatologi, pada umumnya Kabupaten Lumajang hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April-Oktober, hal ini berkaitan dengan arus angin yang berasal dari arah Australia dan tidak mengandung uap air. Sedangkan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober-April dimana pada bulan-bulan tersebut arus angin berasal dari arah Asia dan Samudra Pasifik, yang banyak mengandung uap air. Berdasarkan tipe iklim, Kabupaten Lumajang memiliki iklim tipe C dan D. tipe C yaitu tipe agak basah dengan bulan kering rata-rata < 3 bulan, curah hujan tahunan rata-rata > 2500 mm dan hari hujan > 10 hari perbulan. Sedangkan tipe iklim D yaitu sedang dengan bulan kering rata-rata > 3 – 4 bulan, curah hujan tahunan rata-rata 1500 – 2000 mm dan hari hujan > 10 hari perbulan.

Tabel 7
Tipe Iklim Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Type Iklim (Schmidt and Ferguson)					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	Lumajang	-	-	-	2.847,15	-	2.847,15
2	Sumbersuko	-	-	-	2.907,35	-	2.907,35
3	Sukodono	-	-	-	2.880,86	-	2.880,86
4	Padang	-	-	-	5.838,14	-	5.838,14
5	Senduro	-	-	17.089,65	-	-	17.089,65
6	Pasrujambe	-	-	15.247,45	-	-	15.247,45
7	Gucialit	-	-	10.179,25	-	-	10.179,25
8	Klakah	-	-	-	8.742,00	-	8.742,00
9	Ranuyoso	-	-	-	11.040,50	-	11.040,50
10	Randuagung	-	-	-	9.392,25	-	9.392,25
11	Kedungjajang	-	-	-	6.613,00	-	6.613,00
12	Yosowilangun	-	-	-	7.244,00	-	7.244,00
13	Jatiroto	-	-	-	5.369,00	-	5.369,00
14	Kunir	-	-	-	5.330,00	-	5.330,00
15	Tekung	-	-	-	2.788,00	-	2.788,00
16	Rowokangkung	-	-	-	5.888,00	-	5.888,00

17	Pasirian	-	-	-	12.839,00	-	12.839,00
18	Tempeh	-	-	-	7.321,00	-	7.321,00
19	Candipuro	-	-	14.304,40	-	-	14.304,40
20	Pronojiwo	-	-	14.149,00	-	-	14.149,00
21	Tempursari	-	-	10.535,00	-	-	10.535,00
	Jumlah	0,00	0,00	81.504,75	97.040,25	0,00	178.545,00

Sumber : Balai PSAWS Bondoyudo - Mayang, 2011

Sebagaimana rincian Curah hujan bulanan yang terjadi pada tahun 2009 berkisar antara 0 s.d. 345 mm³ dengan rata-rata hari hujan 1 – 19 hari dalam setiap bulannya. Intensitas hari hujan yang cukup tinggi terjadi selama bulan November hingga Maret.

h. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kabupaten Lumajang memiliki masyarakat yang heterogen, baik dari sisi suku, budaya dan adat maupun agama. Masyarakat Kabupaten Lumajang didominasi oleh suku Jawa dan Madura sebagai bagian dari warga Kabupaten Lumajang, selain itu juga terdapat warga tionghoa (cina), Arab dan suku lain yang datang dan tinggal di Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumajang sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya yang ada serta terbuka terhadap nilai-nilai positif yang datang dari luar, hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Lumajang merupakan daerah dengan kondisi yang sangat kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan visi dan misi pembangunan. Masyarakat Kabupaten Lumajang terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan, sebagian besar masyarakat beragama islam yaitu sebesar 97,86 %, sedangkan 2,14 % yang lainnya adalah penganut Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Tabel 8
PDRB Perkapita Tahun 2009 s.d 2012

No	Agama	Jumlah Penduduk			
		2009	2010	2011	2012
1	Islam	995.166	998.698	1.009.453	984.936
2	Protestan	13.737	13.737	7.771	10.332
3	Katolik	6.393	6.393	3.629	4.045
4	Hindu	5.749	5.749	6.645	6.479

5	Budha	252	252	532	589
6	Konghucu	20	20	73	77
Jumlah		1.021.317	1.024.849	1.028.103	1.006.458

Sumber : Kabupaten Lumajang dalam Angka, 2013

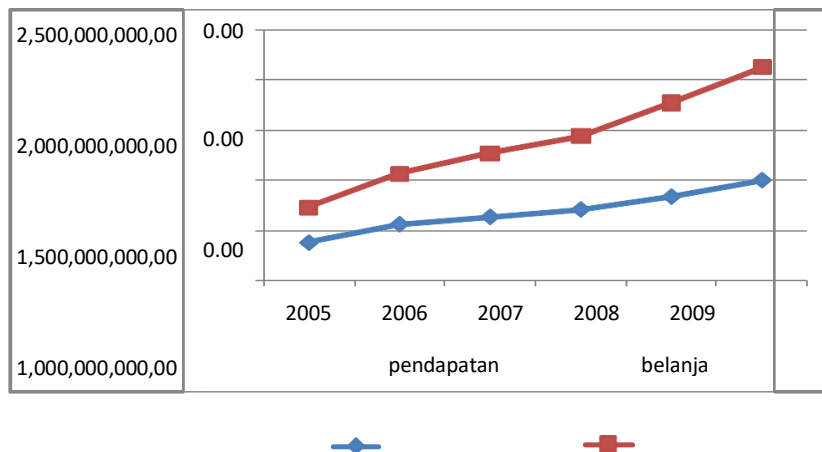
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi yang sangat penting karena menunjukkan produktivitas riil baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang mencapai 5,46 % pada tahun 2009, lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya tertampak pada tabel berikut.

Tabel 9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2010

NO	TAHUN	PERTUMBUHAN (%)
1	2006	4,67
2	2007	5,22
3	2008	5,43
4	2009	5,46
5	2010	5,92

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2011

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir merupakan titik awal daripada konsistensi perekonomian di Kabupaten Lumajang dimana tingkat penerimaan daerah Kabupaten Lumajang lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010 mencapai Rp.1.011.543.235.126. Sedangkan untuk belanja daerah mengalami peningkatan dan melebihi dari pendapatan daerah dimana pada tahun 2010 sebesar Rp.1.114.860.249.075, Gambaran mengenai tingkat penerimaan dan pembiayaan daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 – 2010 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8. Tingkat Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 - 2010

Kinerja perekonomian suatu daerah secara makro dapat digambarkan dari nilai produk domestik regional bruto. Hal ini karena di dalam nilai tersebut mencakup semua output barang dan jasa yang dihasilkan selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dari nilai PDRB tersebut dapat diketahui berbagai indikator antara lain; pertumbuhan ekonomi, inflasi di tingkat produsen, sektor yang dominan dan PDRB perkapita. Adapun gambaran pendapatan dan belanja Kabupaten Lumajang sebagai berikut.

Tabel 10

PDRB Kabupaten Lumajang Tahun 2010 - 2012

No.	Sektor	2010	2011	2012
		Dalam jutaan		
1	PDRB ADHK	6.369.904,29	6.768.517,45	7.202.952,06
2	PDRB ADHB	13.886.442,95	15.583.420,16	17.461.478,27

Sumber : Kabupaten Lumajang dalam Angka, 2013

Peningkatan PAD pada 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat peluang masyarakat untuk bekerja dan berusaha serta bermata pencaharian di Kabupaten Lumajang dalam kondisi yang sehat dan aman. Secara umum peningkatan hasil pembangunan di Kabupaten Lumajang ditunjukkan dengan peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku.

Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 PDRB atas dasar harga berlaku selalu menunjukkan peningkatan. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku selain dipengaruhi oleh peningkatan produksi juga dipengaruhi kenaikan harga.

Beberapa sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lumajang lainnya selain sektor pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menyumbang sebesar 24,77 % serta industri pengolahan sebesar 13,50 %.

Tabel 11
Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2012 (dalam Jutaan)

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012
1	Pertanian	4.893.573,86	5.382.528,07	5.835.322,25
2	Pertambangan dan Penggalian	230.585,17	245.792,94	261.724,30
3	Industri Pengolahan	1.874.458,94	2.108.213,42	2.369.280,16
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	85.481,08	92.289,38	101.853,35
5	Konstruksi	568.854,34	665.639,32	766.577,95
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.440.266,00	3.959.901,76	4.572.986,34
7	Pengangkutan dan Komunikasi	595.427,33	649.976,63	725.883,35
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	569.498,27	648.811,18	745.266,09
9	Jasa - Jasa	1.628.297,94	1.930.267,46	2.082.584,48
	Jumlah	13.886.442,95	15.583.267,46	17.461.478,27

Sumber : Kabupaten Lumajang dalam Angka, 2013

Tabel 12

Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2012 (dalam jutaan)

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012
1	Pertanian	2.275.031,39	2.339.280,96	2.421.561,23
2	Pertambangan dan Penggalian	119.800,04	123.657,60	127.453,89

3	Industri Pengolahan	851.406,26	910.910,54	972.661,84
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	36.920,13	38.780,98	40.894,45
5	Konstruksi	184.460,33	198.331,74	212.234,80
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.548.469,74	1.707.088,83	1.873.547,07
7	Pengangkutan dan Komunikasi	278.319,67	298.857,84	320.448,61
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	274.792,77	296.246,14	317.636,87
9	Jasa - Jasa	800.703,96	855.362,82	916.513,30
	Jumlah	6.369.904,29	6.768.517,45	7.202.952,06

Sumber : Kabupaten Lumajang dalam Angka, 2013

i. Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Semeru

Kawasan Rawan Bencana III

Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang sangat berpotensi dilanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu (pijar), dan atau gas beracun. Kawasan ini meliputi daerah puncak gunung dan sekitarnya.

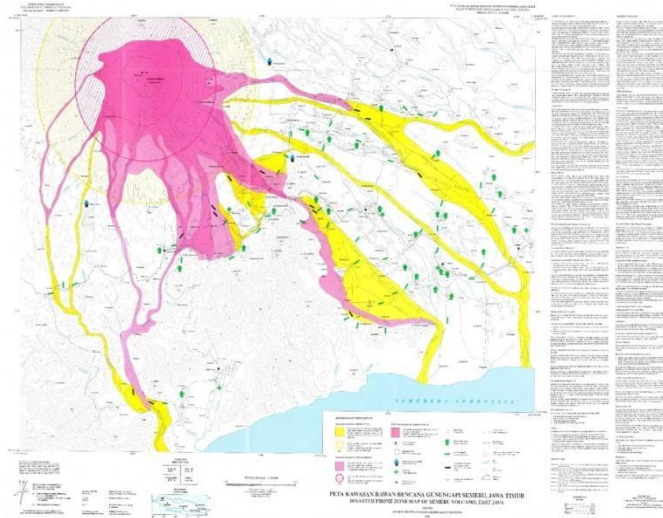
Kawasan Rawan Bencana II

Kawasan Rawan Bencana II adalah kawasan yang berpotensi dilanda awan panas, aliran lava, lontaran batu, guguran lava, hujan lebat abu, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan gas beracun. Kawasan Rawan Bencana II dibedakan menjadi dua.

Kawasan Rawan Bencana I

Kawasan ini adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu dan atau air dengan keasaman tinggi. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan tertimpa material jatuhan berupa hujan lebat serta lontaran batu.

Kawasan Rawan Bencana I dibedakan menjadi dua, pertama kawasan rawan terhadap lahar. Kawasan ini terletak di sepanjang lembah dan bantaran sungai terutama yang berhulu di daerah puncak, yaitu Kampung Manjing, Pancing, Mujur, Rejali, Glidik, Besuk Sarat, Besuk Kembar, Besuk Kobokan, dan Besok Semut. Kedua kawasan rawan terhadap hujan abu tanpa memperhitungkan arah tiupan angin.



Gambar 9. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Semeru Tahun 2021 Sumber: PVMBG, Kementerian ESDM; 2021

2. Histori kejadian

Semeru atau Gunung Meru adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, dengan puncaknya *Mahameru*, 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl). Gunung ini terbentuk akibat subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama *Jonggring Saloko*.

Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah dua kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Semeru mempunyai kawasan hutan Dipterokarp Bukit, hutan Dipterokarp Atas, hutan Montane, dan Hutan Ericaceous atau hutan gunung. Posisi geografis Semeru terletak antara 8°06' LS dan 112°55' BT.

Pada tahun 1913 dan 1946 Kawah Jonggring Saloka memiliki kubah dengan ketinggian 3.744,8 m hingga akhir November 1973. Di sebelah selatan, kubah ini mendobrak tepi kawah menyebabkan aliran lava mengarah ke sisi selatan meliputi daerah Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang. Pada 1 Desember 2020, Gunung Semeru mengalami

letusan yang diikuti guguran awan panas dari puncak. Adapun jarak luncur guguran awan panas ini mencapai 2-11 kilometer.

Pada hari Sabtu, Tanggal 4 Desember 2021 pukul 15.20 WIB, telah terjadi guguran awan panas Gunung Api Semeru yang mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Kronologis kejadian informasi masuk getaran banjir pukul 14.47 WIB amak 20 mm, pada seismograf PPGA Gunung semeru di POS gunung Gunung Sawur, Dusun Poncokusumo Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro dan belum terkonfirmasi getaran banjir atau guguran awan panas. Pukul 14.50 WIB, masyarakat dan para penambang yang beraktifitas di aliran DAS Mujur dan Curah Kobokan dihimbau naik dan tidak melakukan aktifitas di aliran sungai.

Pukul 15.10 WIB, Pos Pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur menyatakan bahwa teramati adanya guguran awan panas dengan arah luncuran mengarah ke Besuk Kobokan dan visual Gunung tertutup kabut dan debu vulkanik dengan aroma belerang. Pukul 15.30 WIB, tim evakuasi BPBD Kabupaten Lumajang menuju lokasi sektoral Candipuro-Pronojiwo untuk melakukan pemantauan dan evakuasi.

Guguran lava melaju dengan jarak luncur 500-800 meter, dengan pusat guguran 500 meter di bawah kawah. Sedangkan, gempa vulkanik yang berkaitan dengan letusan, guguran dan hembusan asap kawah telah terjadi sebanyak 54 kali gempa letusan atau erupsi, 4 kali gempa guguran, dan 18 kali gempa hembusan. Pada 16 Desember 2021 tercatat pukul 23.00 WIB, Gunung Semeru dinaikkan statusnya oleh PVMBG dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III).

Kejadian erupsi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Bencana tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai kejadian bencana alam. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang per tanggal 24 Desember 2021, bencana erupsi Gunung Semeru ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 51 orang meninggal. Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Semeru berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di daerah sekitar Gunung Semeru. Material semburan Gunung Semeru telah mengakibatkan kerusakan di 2 Kecamatan (Candipuro dan Pronojiwo) di dua desa (Sumberwuluh dan Supiturang) dengang Rusak berat 1107 unit, Rusak Sedang 95 Unit dan Rusak Ringan 657 Unit.

3. Program Pemulihan Pasca Bencana

Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun pertama pascabencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten/kota dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.

Sumber pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Lumajang dan sumber lainnya seperti dana masyarakat, dunia usaha, dan bantuan/hibah lainnya. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah yang terkena bencana dalam hal APBD tidak memadai dalam membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bantuan diberikan melalui mekanisme Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara *bottom-up* dan partisipatif, yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikonsolidasikan oleh BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dihitung berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna). Pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap akibat bencana dan dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Pengkajian akibat bencana, dampak bencana sampai kepada kebutuhan pasca bencana meliputi sektor Perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor. Total kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Erupsi Gunung Semeru Kabupaten

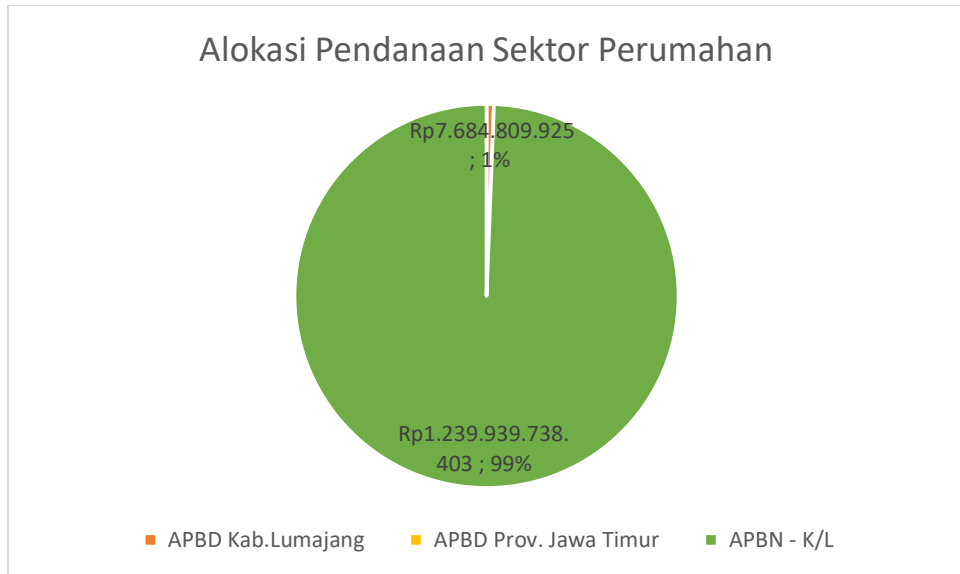
Lumajang Tahun 2022-2024 di Kabupaten Lumajang sebesar **Rp. 2,461,445,179,130,-**. Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Tahun 2022-2024 di Kabupaten Lumajang untuk setiap sektor diuraikan sebagai berikut :

Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan

Secara umum perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor Perumahan terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor perumahan terhadap masyarakat terdampak dan memiliki ancaman resiko bencana, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. **1,321,155,482,430,-** yang bersumber dari APBN.

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan hunian tetap (huntau), pembangunan rumah terdampak bencana dari Kementerian PU-PR, bantuan stimulan rusak berat dan rusak sedang untuk pembangunan rumah pola pemberdayaan masyarakat, bantuan isi rumah, pendampingan (Konsultan Management, Fasilitator, *Quality Assurance*) dan penyediaan prasarana lingkungan. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Lumajang diarahkan untuk penyediaan lahan perumahan, hunian sementara (huntau), pembuatan site plan, bantuan stimulan rusak ringan, dan penyediaan prasarana lingkungan, dan recovery infrastruktur yang lainnya. Sementara itu sumber pendanaan lainnya diperoleh dari CSR maupun dana masyarakat untuk pembangunan hunian sementara (huntau), bantuan logistik dan recovery infrastruktur yang lainnya.

Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor Perumahan disajikan dalam gambar di bawah ini.:



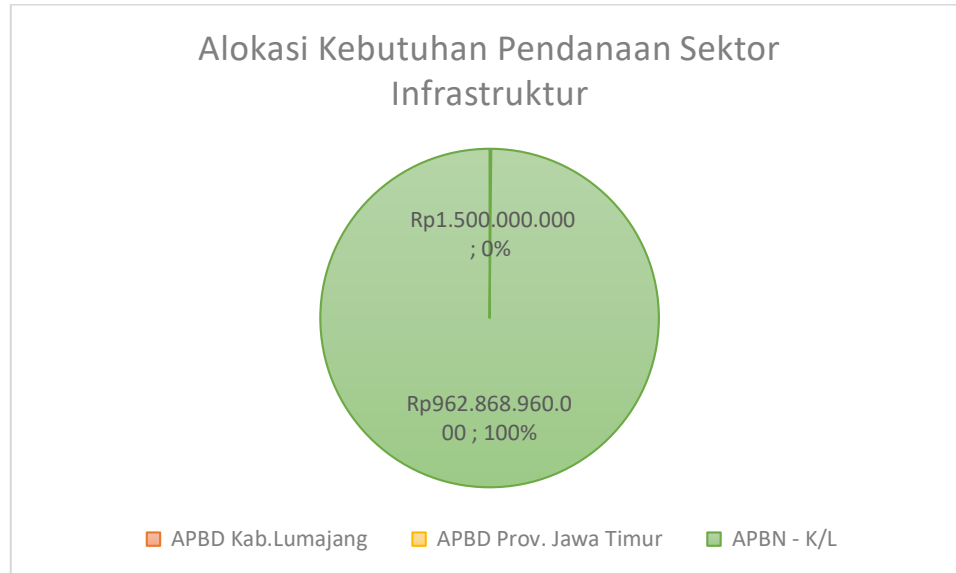
Gambar 10. Alokasi Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Tahun 2022-2024

Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor transportasi, air dan sanitasi serta sumberdaya air, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar **Rp 991,548,960,000,-**

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sarana air bersih dan sumber daya air. Sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sarana air bersih dan sumber daya air irigasi. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Lumajang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jembatan, dan sumber daya air irigasi. Sementara itu sumber pendanaan lainnya diperoleh dari CSR maupun dana masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dan biaya non fisik lainnya.

Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur disajikan dalam Tabel 5.2.



Gambar 11. Alokasi Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur Pasca bencana Erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Tahun 2022-2024

Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor Kesehatan, Pendidikan, Agama, Lembaga Sosial dan Pendampingan / Pemberdayaan Sosial Masyarakat, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar **Rp. 64,848,438,000,-**.

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, keagamaan, panti sosial, dan Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat. Sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan, dan lembaga sosial. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Lumajang diarahkan untuk pelayanan posyandu dan pendidikan. Sementara itu sumber pendanaan lainnya diperoleh dari CSR maupun dana masyarakat untuk pelayanan kesehatan rumah sakit/puskesmas, PMI dan pondok pesantren.

Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial disajikan dalam Tabel 5.3.

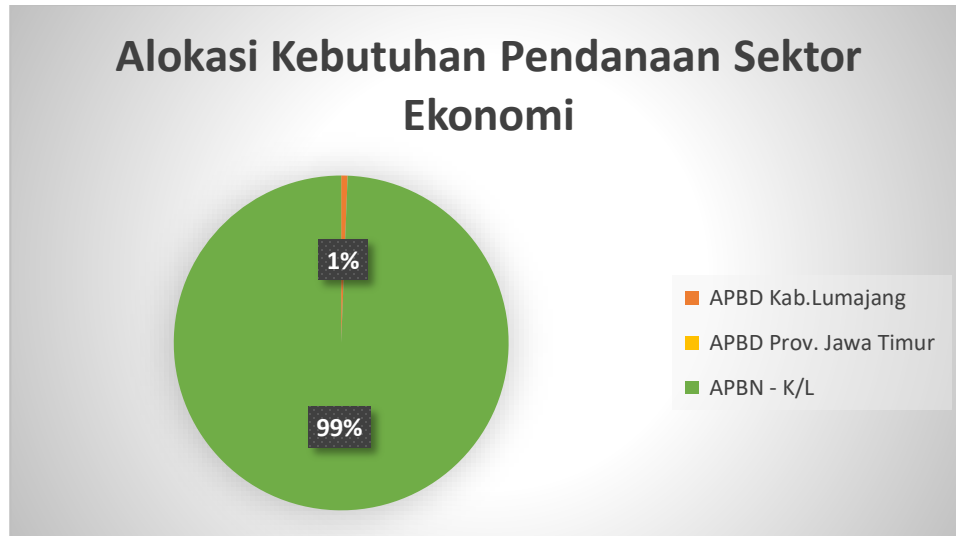


Gambar 12. Alokasi Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Tahun 2022-2024

Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi dan UKM, perindustrian dan pendampingan/pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar **Rp. 70,861,030,700,-**

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi dan UKM, perindustrian dan pendampingan/pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas UKM dan perdagangan. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Lumajang diarahkan untuk pemulihan sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan koperasi dan UKM. Sementara itu sumber pendanaan lainnya diperoleh dari swasta untuk pembangunan industri menengah. Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi disajikan dalam Tabel 5.4.



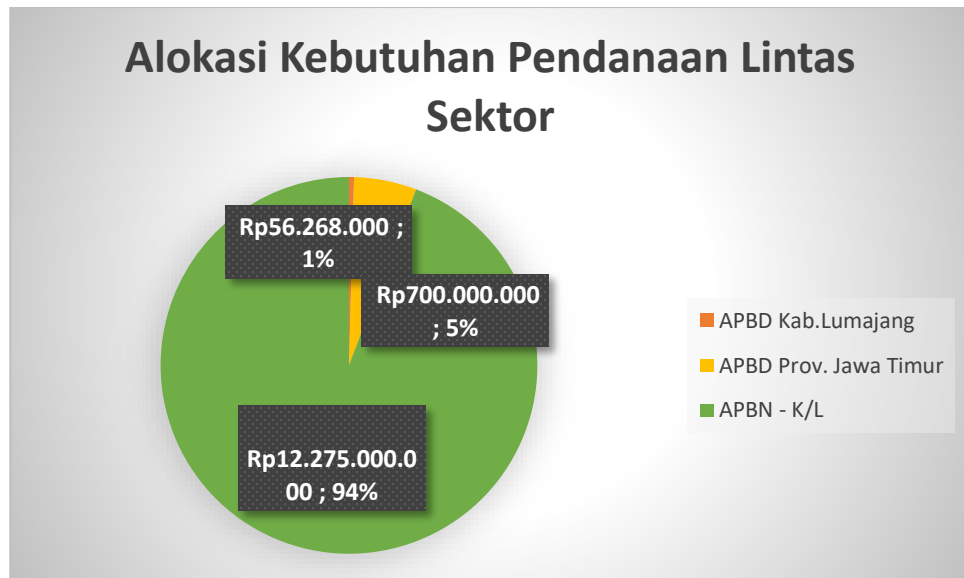
Gambar 13. Alokasi Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi Pasca bencana Erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Tahun 2022-2024

Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor Pemerintahan, Pengurangan Risiko Bencana (PRB), dan Lingkungan Hidup, dan memastikan pengarusutamaan GEDSI (Gender dan Sosial Inklusi) dalam berbagai strategi pelaksanaan pemulihan, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar **Rp 13.031.268.000,-**.

Sumber pendanaan dari APBD diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sub sektor ketertiban (POLRI), keamanan (TNI), dan lingkungan hidup untuk penanganan pemulihan dan pengolahan sampah, serta pengurangan resiko bencana.

Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor disajikan dalam Tabel 5.5.



Gambar 14. Alokasi Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor Pasca bencana Erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Tahun 2022-2024

Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari APBN berupa dana siap pakai BNPB, hibah pemerintah kepada pemerintah daerah (dari Kementerian Keuangan), DIPA Kementerian/Lembaga teknis terkait, dan APBD sesuai kewenangan masing-masing. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dalam dua tahun anggaran, yakni dari 2022 sampai dengan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemulihan sektor Perumahan dilaksanakan selama dua tahun anggaran, yakni tahun anggaran 2022-2023;
2. Pemulihan sektor infrastruktur dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana infrastruktur untuk pelayanan transportasi, air minum, sumberdaya air dan irigasi, serta kegiatan pengurangan risiko bencana;
3. Pemulihan sektor ekonomi produktif dilaksanakan secara bertahap bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi produktif, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana;
4. Pemulihan sektor sosial diprioritaskan pada tahun anggaran 2022-2023; bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana; dan
5. Pemulihan lintas sektor diprioritaskan pada tahun anggaran 2022-2023 dalam rangka mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dalam

pengurangan risiko bencana dan memastikan kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan.

Identifikasi potensi sumber pendanaan ditempuh dengan cara pendayagunaan anggaran pemerintah sebagai berikut:

1. Rupiah murni APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2022, 2023 dan 2024 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terkena dampak bencana melalui realokasi (jika dimungkinkan) kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku;
2. Anggaran perubahan APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2022 didayagunakan secara optimal untuk upaya penyelenggaraan transisi darurat sebagai dasar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku; dan
3. Anggaran pemerintah APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2023 dan 2024 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

Berdasarkan upaya tersebut, maka indikasi pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 13

***Rekapitulasi Kebutuhan Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang
Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2023***

Sektor	Nilai Kebutuhan	Pendanaan (Rp) TA 2022 - 2024					
		APBD Kab.Lumajang	APBD Prov. Jawa Timur	APBN - K/L		Sumber Lain	Rencana Usulan
		TA. 2022 - 2024		TA. 2022 - 2023	TA. 2023 - 2024		
Perumahan	Rp1,321,155,482,43 0	Rp7,684,809,925		Rp1,239,939,738,40 3		Rp73,530,938,364	
Infrastruktur	Rp991,548,960,000		Rp1,500,000,00 0	Rp962,868,960,000		Rp27,180,000,000	

Ekonomi	Rp70,861,030,700	Rp420,000,000	Rp277,095,000	Rp33,549,450,000		Rp36,614,485,700	
Sosial	Rp64,848,438,000	Rp48,888,000		Rp35,293,550,000		Rp29,506,000,000	
Lintas Sektor	Rp13,031,268,000	Rp56,268,000	Rp700,000,000	Rp12,275,000,000			
Rp2,461,445,179,130		Rp2,477,095,000		Rp2,283,926,698,403	Rp166,831,424,064		
0		Rp8,209,965,925		0	Rp0		

Kelembagaan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikoordinasikan di tingkat daerah oleh BPBD Kabupaten Lumajang dan oleh BNPB untuk koordinasi di tingkat Pusat.

Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian / Lembaga dan atau Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Provinsi dan atau Kota. Semua pelaksanaan teknis dari aspek – aspek rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama Kementerian Lembaga dan OPD.

Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku.

5.3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

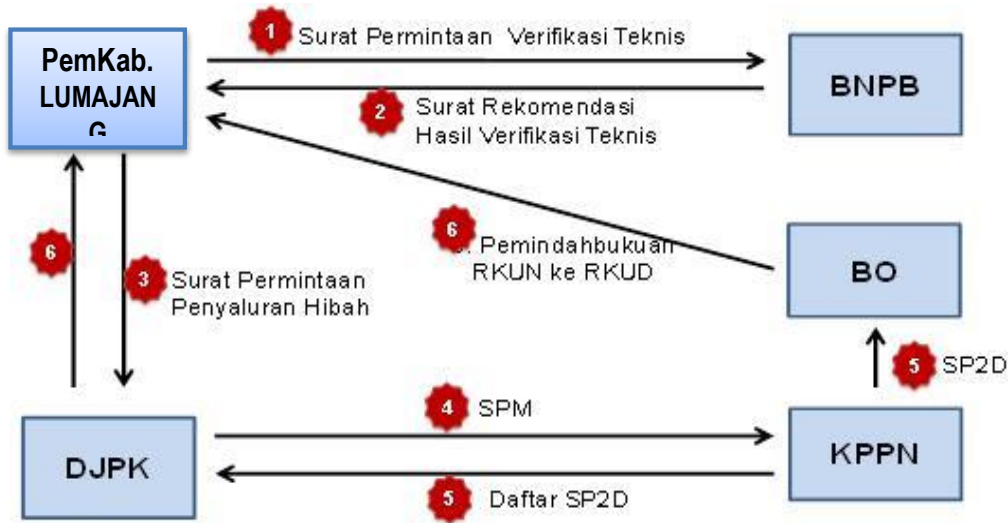
5.3.1. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Erupsi Gunung Semeru Tahun 2022-2024 di Kabupaten Lumajang mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut.

Skema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pendanaan yang bersumber dari kementerian/lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam kerangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut:
 - 1) Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran;
 - 2) Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 - 3) Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
2. Pembiayaan yang menggunakan APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Lumajang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.
3. Pembiayaan yang menggunakan DSP BNPB akan mengikuti pola pelaksanaan anggaran DSP BNPB.
4. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Daerah akan mengikuti pelaksanaan anggaran keuangan daerah. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Kabupaten Lumajang menyampaikan usulan bantuan pendanaan kepada Pemerintah melalui Kepala BNPB berdasarkan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang .
 - 2) BNPB akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi atas usulan bantuan tersebut dengan melakukan konfirmasi dan validasi terhadap R3P Erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Tahun 2022-2024 di Kabupaten Lumajang.
 - 3) Kepala BNPB akan menyampaikan surat usulan kepada Menteri Keuangan untuk dapat mengalokasikan anggaran Hibah kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Surat usulan kepala BNPB ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan termasuk rekomendasi untuk mengalokasikan anggaran Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - 4) Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan proses Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui suatu Surat Pemberitahuan Hibah
 - 5) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hibah, akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dan Bupati Kabupaten Lumajang.

- 6) PPA dan KPA Hibah pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan melakukan proses pencairan Hibah dari R KUN ke R KUD Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Satker BPBD Kabupaten Lumajang sebagaimana terdapat pada gambar berikut:



Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

Gambar 15. Alur proses dana hibah dari pusat ke daerah

5.3.2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sasaran rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan kondisi sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial-ekonomi-budaya, serta pemulihan keamanan dan ketertiban yang pada prinsipnya memulihkan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik.

Sasaran kegiatan rekonstruksi adalah memulihkan sistem secara keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan ke dalam pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan pendekatan *build back better and safer*. Kegiatan rekonstruksi yang dimaksud meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak, pembangunan hunian tetap di tempat relokasi, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, membangkitkan kembali kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta peningkatan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, dengan menerapkan aspek pengurangan risiko bencana dan mengutamakan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Di tingkat pusat, kegiatan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BNPB. Di tingkat daerah, kegiatan teknis dilaksanakan oleh OPD teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

5.3.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dalam periode tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024 dengan jadwal sebagaimana terdapat pada Tabel 5.7.

Tabel 14

Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Tahun 2022-2024

No	Kegiatan	Tahun 2021	Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				PASCA BENCANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
PERSIAPAN															
1	Penanganan darurat bencana														
2	Pelaksanaan Transisi Darurat Bencana														
3	Persiapan Operasional														
4	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi														
a	Sektor Perumahan														
b	Sektor Infrastruktur														
c	Sektor Ekonomi Produksi														
d	Sektor Sosial														
e	Lintas Sektor														

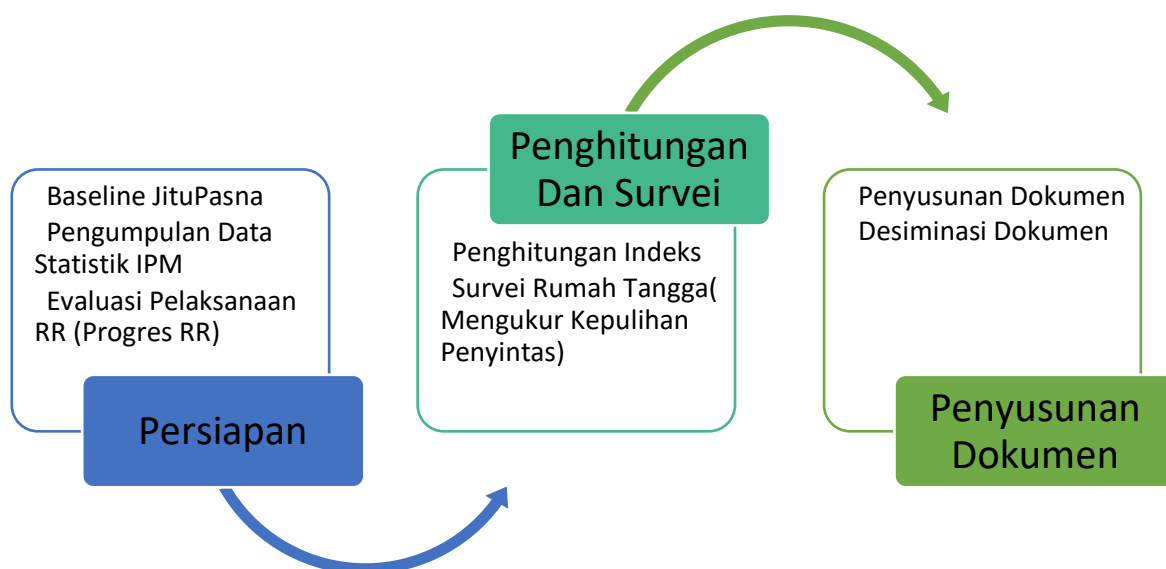
Jadwal pelaksanaan sebagaimana terdapat pada Tabel 5.7 akan dapat tercapai dengan asumsi anggaran tersedia secara tepat waktu dan cukup, serta komponen pendukung kegiatan seperti penyediaan lahan dan lain-lain dapat selesai tepat waktu.

B. Evaluasi dan Indeks Pemulihan

1. Metodologi

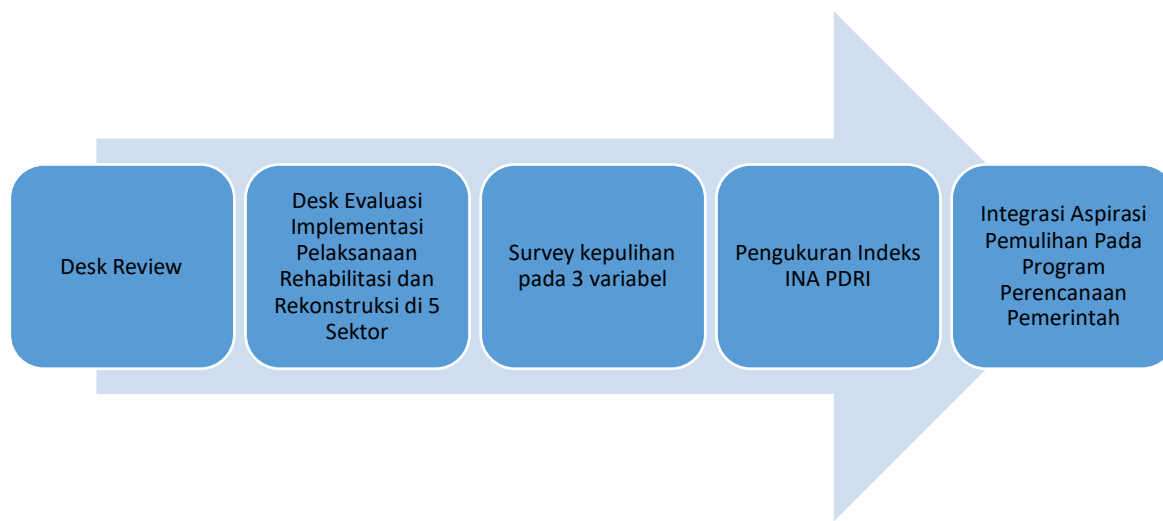
Ina-PDRI atau Indeks Pemulihan Pasca Bencana Indonesia pertama kali digunakan di Indonesia pasca Erupsi Merapi di Yogyakarta-Jawa Tengah tahun 2010. Secara umum, Ina PDRI memandu perhitungan indeks pemulihan dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini mengembangkan seperangkat karakteristik yang relevan untuk menghitung Ina-PDRI guna mengukur keberhasilan program pemulihan pascabencana. Karena Ina-PDRI merupakan salah satu jenis evaluasi, maka penghitungan indeks ini akan memilih indikator yang mencerminkan manfaat (*outcome*) atau keberfungsian output kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan mengacu pada sasaran substansial program rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, harus selalu dipertimbangkan untuk risiko logika sirkular dan ketergantungan pada data sekunder.

Dalam menyusun dokumen Ina PDRI maka dilakukan beberapa tahapan sebagai Berikut;



Gambar 16. Tahapan Penyusunan Dokumen Ina PDRI

Untuk melakukan tahapan tersebut metodologi yang dilakukan adalah sebagai berikut :



Gambar 17. Metodologi Penyusunan Dokumen Ina PDRI

Desk review

Desk review dilakukan setelah proses pengumpulan data sekunder sebagai bahan untuk analisa Ina-PDRI yang akan dilakukan . Data yang harus ada untuk melakukan desk review adalah Dokumen R3P sebagai dasar yang digunakan untuk pelaksanaan RR.

Selain data R3P adalah data statistik yang menggambarkan indeks pembangunan manusia yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik. Data lain yang digunakan untuk desk review adalah data dan informasi awal terkait perkembangan pelaksanaan RR yang dilakukan.

Desk Evaluasi Pelaksanaan RR

Desk Evaluasi pelaksanaan RR dilakukan dengan metode FGD, dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan RR yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RR yang tercantum dalam R3P maupun yang secara riil melakukan kerja-kerja pemulihan pasca bencana. Keluarannya adalah mendapatkan seberapa perkembangan atas pelaksanaan RR.

Survei Kepulihan

Survei pemulihan pasca bencana ini dilakukan dengan target survey rumah tangga yang terdampak dan menjadi target program pemulihan pasca bencana. Hasil ini menjadi data kualitatif sebagai “diagnosa” atas kenapa pulih kenapa tidak pulih atas intervensi pemulihan pasca bencana.

Pengukuran Indeks

Pengukuran indeks pemulihan dilakukan dengan rumus sebagai berikut;

Rumus Ina PDRI

1

$$Ina-PDRI_{it} = \frac{N_i}{n_i} \times \left(\sqrt[3]{A_{pit} \times A_{sit} \times A_{eit}} \right); n_i \neq 0$$

2

$$A_{pit} = \frac{n_{it}}{N_{it}} \left(\sqrt[3]{APM_{SDadj} \times APM_{SLTPadj} \times APM_{SLTAadj}} \right)$$

3

$$A_{sit} = \frac{n_{it}}{N_{it}} (100\% - MOR_{adjit})$$

4

$$A_{eit} = \frac{n_{it}}{N_{it}} (TPAK_{it} - S_{eit})$$

Remarks :

$Ina-PDRI_{it}$: Indonesia Post Disaster Recovery index in area i at time t

A_{pit} : The education aspect of the Recovery Index in area i at time t

A_{sit} : The health aspect of the Recovery Index in area i at time t

A_{eit} : The economic aspect of the Recovery Index in area i at time t

n_i : Total affected area i (km²)

N_i : Total administrative area i (km²)

APM_{SDadj} : Adjusted primary school net enrollment

$APM_{SLTPadj}$: Adjusted junior high school net enrollment rate

$APM_{SLTAadj}$: Adjusted senior high school net enrollment rate

MOR_{adjit} : Adjusted Morbidity Rate

$TPAK_{it}$: Labour force participation rate in area i at time t

S_{eit} : Corrections to indicator of economic facilities

Gambar 18. Rumus Ina PDRI

Tujuan dilakukan pengukuran indeks ini adalah program rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki ukuran umum tingkat pemulihan pascabencana atas rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan berbagai pihak dan dapat diterapkan pada tingkat kabupaten/kota

Indikator-indikator pemulihan dapat dikategorikan ke dalam kategori sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Dari kategori tersebut, infrastruktur; seperti restorasi fasilitas publik dan penunjang kehidupan (misalnya sekolah, sistem air dan listrik) serta perbaikan (atau membangun kembali) perumahan merupakan kategori yang sering ditelaah. Salah satu alasannya adalah, bahwa indikator infrastruktur umumnya diukur

pada tingkat output sehingga lebih mudah diukur dibanding indikator sosial yang umumnya pada tingkat outcome.

Dalam penghitungan Ina-PDRI digunakan pendekatan *inductive*, sehingga untuk menghitung Ina-PDRI ini akan disusun satu set karakteristik yang dipandang relevan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemulihan pasca bencana. Mengingat bahwa PDRI ini merupakan suatu bentuk evaluasi, maka dalam penghitungannya akan dipilih indikator-indikator yang mencerminkan manfaat (outcome) atau berfungsinya keluaran (output) dari program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan dan merujuk pada sasaran substansial program rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu aspek kemanusiaan, perumahan dan permukiman, infrastruktur pembangunan, ekonomi, sosial, dan lintas sektor (**Peraturan BNPB No 5 tahun 2017**).

Hubungan antara aspek dan indikator tersebut dalam penyusunan Ina-PDRI dapat dilihat ada tabel berikut :

Tabel 15

Hubungan antara aspek dan indikator tersebut dalam penyusunan Ina-PDRI

Sektor/Aspek	Indikator	Ukuran
Kemanusiaan	Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan jenis sarana kesehatan
	Pelayanan Pendidikan	Jumlah dan jenis sarana pendidikan
Perumahan dan Permukiman	Rumah layak huni (sesuai dengan standar WHO)	Luas lantai per kapita Jenis lantai
	Prasarana/ sarana air bersih	Persentase rumah tangga menurut sumber air minum dan sumber air untuk memasak
Infrastruktur	Penerangan	Penggunaan listrik di rumah tangga
	Prasarana Jalan dan Jembatan	Akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi
Sosial	Partisipasi Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) usia sekolah SD, SLTP, & SLTA

	Partisipasi Kesehatan	Tingkat keluhan/prevalensi pada jenis penyakit
Ekonomi	Ekonomi Produktif Rumah Tangga	Daya beli (Purchasing Power Parity – PPP)
	Ekonomi Wilayah	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
	Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran
	Kemiskinan	Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
Lintas Sektor	Aktivitas tata pemerintahan	Kelengkapan dan berfungsinya aparaturnya pemerintahan



Bagan Kegiatan Pemulihan di 5 Sektor Rehabilitasi dan Rekonstruksi mendukung pada pemulihan/peningkatan pembangunan manusia

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 6 tahun 2017 evaluasi didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan suatu

usaha untuk mengukur dan menilai secara objektif atas hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan secara sistematis dan objektif, dengan menggunakan metode evaluasi yang sesuai, dilakukan melalui analisis pada tahapan perencanaan hingga pelaksanaan dan diharapkan akan diperoleh upaya untuk menyelesaikan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan pasca pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).

Dengan demikian, evaluasi bertujuan untuk melihat manfaat untuk perencanaan selanjutnya. Manfaat atau hasil (outcome) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sedangkan, Dampak (impact) adalah penilaian terhadap hasil dilakukan untuk menunjukkan telah dicapainya berdasarkan indikator yang mencerminkan fungsi atau manfaat keluaran kegiatan. Umpan balik evaluasi digunakan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya

Integrasi Aspirasi Pemulihan Pada Program Perencanaan Pemerintah

Integrasi aspirasi pemulihan ini dilakukan untuk melihat “gap” antara program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dijalankan dengan kondisi terkini setelah dilakukan intervensi program. Dari penghitungan indeks di 3 aspek penghidupan hak dasar warga yaitu aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Aspirasi warga terdampak diperoleh dari survey kepulihan yang sudah dilakukan dan dikolaborasikan dengan perencanaan dan penganggaran reguler yang dilakukan oleh setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Tabel 16

Jadwal Kegiatan Penyusunan Dokumen Ina PDRI

Kegiatan	Bulan I				Bulan II			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Desk Reviu								
Evaluasi Pelaksanaan RR								
Survei Rumah Tangga								
Penghitungan Indeks								

Laporan Awal								
Perbaikan atas Penghitungan Indeks								
Laporan Akhir								

2. Evaluasi Program (program terlaksana/belum, penyebabnya)

Untuk mengetahui beberapa program pemulihan yang sudah dilakukan maka dilakukan penggalan aspirasi melalui survey rumah tangga dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 17
Lokasi Responden Jitupasna

Lokasi Survey
Kecamatan Candipuro
Kecamatan Pronojiwo

Survey ini memperhatikan jenis kelamin perempuan, dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman dan kebutuhan yang tentunya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan survei yang dilakukan terdapat 47.35% responden perempuan

Tabel 18
Jenis Kelamin Responden

Nilai	Frekuensi	Persentase
Perempuan	159	52.65
Laki-laki	143	47.35

Kriteria responden adalah kepala keluarga baik laki-laki maupun kepala keluarga perempuan serta anggota keluarga lainnya yang mengetahui situasi dalam keluarga. Survei ini menggunakan pendekatan

survei keluarga, adapun usia responden paling banyak menempati adalah di usia 19 – 35 tahun sebanyak 32,12%, usia 36 – 45 tahun sebanyak 27,48% dan usia 46-60 tahun sebanyak 27,15%.

Tabel 19
Usia Responden

Nilai	Frekuensi	Persentase
19 - 35	97	32.12
36 - 45	83	27.48
46 - 60	82	27.15
>60	38	12.58
<18	2	0.66

Dalam survey ini, responden yang telah menikah sebanyak 87,09%, dalam status cerai mati sebanyak 7,95% dan 2,65% berstatus lajang.

Tabel 20
Status Perkawinan Kepala keluarga

Nilai	Frekuensi	Persentase
Menikah	263	87.09
Bercerai Mati	24	7.95
Lajang	8	2.65
Bercerai Hidup	7	2.32

Survey ini juga mendata posisi responden di dalam keluarga, 48.68% responden posisi sebagai istri dan 43,38% sebagai suami, dan terdapat 3.97% responden merupakan kepala keluarga perempuan.

Tabel 21
Posisi Dalam Rumah Tangga

Nilai	Frekuensi	Persentase
Istri	147	48.68
Suami	131	43.38
Kepala Keluarga Perempuan	12	3.97
Anak	7	2.32
Lainnya	5	1.66

Jumlah anggota keluarga paling banyak 3-4 orang dengan prosentase 51,99%, kurang atau sama dengan 2 orang sebanyak 27,48%, 4-5 orang sebanyak 14,57%, 5-6 orang sebesar 4,97% dan lebih dari 7 orang terdapat 0,99%.

Tabel 22
Jumlah Anggota Keluarga di Rumah

Nilai	Frekuensi	Persentase
3-4	157	51.99
<=2	83	27.48
4-5	44	14.57
5-6	15	4.97
>=7	3	0.99

Dari hasil survey, terdapat 4,64% responden memberikan informasi bahwa terdapat anggota keluarga yang disabilitas.

Tabel 23
Jumlah Keluarga Yang Memiliki Anggota Keluarga Disabilitas

Nilai	Frekuensi	Persentase
Tidak Ada	288	95.36
Ada	14	4.64

Dari jumlah anggota keluarga yang disabilitas, terdapat 2,65% anggota keluarga disabilitas perempuan dan 1,99% anggota keluarga disabilitas laki-laki.

Tabel 24
Jenis Kelamin Penyandang Disabilitas

Nilai	Frekuensi	Persentase
Perempuan	8	2.65
Laki-laki	6	1.99

Dari jumlah anggota keluarga yang disabilitas, terdapat ragam disabilitas di antaranya 1,66% sakit stroke, 0,99% Disable wicara, 0,66% penyandang depresi, 0,33% disable netra, 0,33% disable fisik, 0,33% down syndrome dan 0,33% penyandang disabilitas ganda.

Tabel 25
Jenis Ragam Disabilitas

Nilai	Frekuensi	Persentase
Sakit Stroke	5	1.66
Disabilitas wicara	3	0.99
Penyandang Depresi	2	0.66
Disabilitas Netra (totally blind/low vision)	1	0.33
Disabilitas fisik (misalnya terganggunya fungsi gerak kaki/tangan)	1	0.33
Down Syndrome	1	0.33
Penyandang disabilitas ganda	1	0.33

Survey ini juga melihat aktivitas responden saat ini, terdapat lebih 51,32% responden bekerja, 29,47 beraktivitas mengurus rumah tangga, dan 10,26% dalam proses mencari pekerjaan.

Tabel 26
Aktivitas Responden Saat ini

Nilai	Frekuensi	Persentase
Bekerja	155	51.32
Mengurus Rumah Tangga	89	29.47
Mencari Pekerjaan	31	10.26
Lainnya	26	8.61
Sekolah	1	0.33

Survey berbasis rumah tangga ini juga memotret jenis pekerjaan responden, dari total responden terdapat 27,81% bekerja sebagai petani, 11,92% responden bekerja di sektor jasa, 11,59% bekerja sebagai pedagang, 11.26% responden bekerja sebagai penambang, responden yang bekerja di perkebunan 1,66%, dan sebagai pegawai 1.32%. Responden yang menjawab lainnya sebanyak 34,44%.

Tabel 27
Pekerjaan Utama

Nilai	Frekuensi	Persentase
Lainnya	104	34.44
Petani	84	27.81
Jasa	36	11.92
Pedagang	35	11.59
Penambang	34	11.26
Pekebun	5	1.66
Pegawai	4	1.32

Berdasarkan hasil survey akibat dari bencana Semeru, berkaitan dengan data hunian masyarakat terdampak, terdapat 71,85% responden menempati hunian tetap, 27,48% menempati rumah sendiri, sementara 0,33% responden menempati rumah sewa dan 0,33% responden menjawab lainnya.

Tabel 28
Status hunian Sekarang

Nilai	Frekuensi	Persentase
Hunian Tetap	217	71.85
Rumah Sendiri	83	27.48
Rumah Sewa	1	0.33
Lainnya	1	0.33

Dari 71,85% responden yang menempati hunian tetap, terdapat 62,25% responden yang sudah merasa nyaman dengan dukungan fasilitas yang ada, sedangkan 9,6% responden menjawab belum.

Tabel 29
Kelayakan fasilitas pendukung di hunian tetap

Nilai	Frekuensi	Persentase
Ya	188	62.25
Belum	29	9.6

Dari 9,6% responden yang merasa belum didukung oleh fasilitas pendukung hunian tetap yang memadai, 3,31% berpendapat akses transportasi ke pelayanan kesehatan masih terlalu jauh dan mahal, 1,66% responden berpendapat keamanan kawasan hunian tetap baik dari kerawanan kejahatan maupun perlindungan dari ancaman bencana belum memadai, dan 1.32% responden berpendapat pengelolaan lingkungan seperti limbah rumah tangga, sampah, sanitasi dan lainnya belum memadai, sedangkan 4,3% responden berpendapat adanya permasalahan lainnya.

Tabel 30
Apabila belum, apa permasalahan yang ada tentang layanan dasar di hunian tetap

Nilai	Frekuensi	Persentase
Lain-lain	13	4.3
Akses transportasi ke layanan kesehatan masih terlalu jauh dan mahal	10	3.31
Keamanan kawasan huntap baik dari kerawanan dari kejahatan maupun perlindungan dari ancaman bencana belum memadai	5	1.66
Pengelolaan lingkungan seperti limbah rumah tangga, sampah, sanitasi dan lain-lain belum memadai.	4	1.32

1. ASPEK PENDIDIKAN

Berdasarkan hasil survei dampak bencana letusan Semeru, terdapat gangguan di bidang pendidikan yang dirasakan oleh warga penyintas. Terdapat rusaknya sarana dan prasarana pendidikan karena bencana sebesar 5.96%, 0.66% responden juga menyebutkan bahwa setelah kejadian bencana beban orang tua meningkat dalam mendampingi belajar anak dari rumah dan sebesar 0.33% responden menyebutkan bahwa kurangnya tenaga pendidik dan/atau kurangnya kapasitas guru dalam penguasaan metode belajar. Gangguan aspek pendidikan dirasakan belum pulih oleh masyarakat, dari hasil survey terdapat 0,66% responden menganggap sama saja, artinya belum ada peningkatan pemulihan dari saat bencana sampai dengan saat ini

Tabel 31
Gangguan di bidang pendidikan yang dirasakan

Nilai	Frekuensi	Persentase
Rusaknya sarana dan prasarana pendidikan karena bencana	18	5.96
Beban orang tua meningkat dalam mendampingi belajar anak dari rumah.	2	0.66
Kurangnya tenaga pendidik dan/atau kurangnya Kapasitas Guru dalam Penguasaan Metode Belajar	1	0.33

Tabel 32**Apakah program pemulihan di bidang pendidikan tersebut sudah Pulih**

Nilai	Frekuensi	Persentase
Ya	18	5.96
Sama Saja	2	0.66

2. ASPEK KESEHATAN

Pada aspek kesehatan, sebanyak 4.3% responden mengalami gangguan terkait pelayanan bantuan kesehatan, asuransi dan regulasi atas akses layanan kesehatan. Terdapat 2,32% responden menyebutkan bahwa ongkos transportasi semakin mahal dan aksesnya sulit, harga layanan kesehatan, obat dan alat medis lainnya semakin tidak terjangkau. Masih terkait dengan gangguan kesehatan, terdapat 1,66% responden menyebutkan bahwa alat kesehatan, obat dan tenaga medis kurang, dan adanya kerusakan bangunan pusat layanan kesehatan fisik dan mental. 0.99% responden juga menganggap kurangnya dukungan promosi kesehatan, sementara 0,66% responden menganggap kurangnya dukungan kuratif kesehatan, sementara itu 0,33% menyebutkan kurangnya dukungan pendidikan pencegahan penyakit dan gizi buruk.

Tabel 33**Gangguan Kesehatan yang Dirasakan**

Nilai	Frekuensi	Persentase
Gangguan Lain-Lain Terkait Pelayanan. (Asuransi/Bantuan Askes rumit/regulasi/ dll)	13	4.3
Ongkos Transportasi semakin mahal, aksesnya sulit. Harga-Harga Layanan Kesehatan, Obat, Alat Medis Semakin Tak Terjangkau.	7	2.32
Alat, obat dan tenaga medis kurang, kerusakan bangunan pusat layanan Kesehatan Fisik dan Mental, Tidak tersedia layanan Kesehatan mental dll	5	1.66
Kurangnya dukungan promosi kesehatan	3	0.99
Kurangnya dukungan kuratif kesehatan,	2	0.66
Kurangnya dukungan pendidikan pencegahan penyakit dan gizi buruk.	1	0.33

Berdasarkan hasil survey, disebutkan oleh 4,97% responden bahwa setelah adanya program pemulihan, masih terdapat gangguan-gangguan kesehatan, sementara 1,99% menyebutkan sudah tidak ada gangguan kesehatan, dan sebanyak 1.32% berpendapat sama saja.

Tabel 34

Pemulihan gangguan kesehatan setelah program pemulihan dijalankan

Nilai	Frekuensi	Persentase
Ya	15	4.97
Tidak	6	1.99
Sama Saja	4	1.32

3. ASPEK EKONOMI

Dalam masa pasca bencana, terdapat banyak program yang diagendakan oleh pemerintah dan swasta, karena pasca bencana dibutuhkan intervensi untuk pemulihan, salah satu aspek yang membutuhkan pemulihan jangka menengah atau panjang adalah aspek ekonomi. Dalam survei rumah tangga pasca bencana Semeru, terdapat beberapa gangguan di aspek ekonomi, 74,83% responden mengatakan adanya gangguan uang untuk kebutuhan modal usaha, 26,16% responden mengatakan adanya gangguan aset sarana produksi atau tempat kerja, 7,62% berpendapat mengalami gangguan

distribusi dan gangguan pasar, serta gangguan sumber daya manusia, seperti sakit, menjadi cacat, meninggal dunia, pekerja keluar dari tempat bekerja sebesar 2,65%.

Tabel 35
Gangguan Aspek Ekonomi yang Dirasakan

Nilai	Frekuensi	Persentase
Gangguan Uang Modal Usaha (Modal lancar untuk produksi)	226	74.83
Gangguan asset sarana produksi/tempat kerja (sawah, warung, dapur, pabrik, Gudang, kendaraan dll)	79	26.16
Gangguan Distribusi (jalur pasok rusak, tidak ada distributor, tidak ada pengepul, hasil, dll) dan Gangguan Pasar (tidak ada per-mintaan, pasar rusak, pembelian berhenti membeli, dll)	23	7.62
Gangguan SDM (Menjadi cacat, mati, sakit, pekerja keluar bagi pengusaha, dll)	8	2.65

Program pemulihan pasca bencana di aspek ekonomi telah dilakukan pemerintah dan swasta. Hasil survey menggambarkan bahwa belum sepenuhnya program-program pemulihan dapat menjawab kebutuhan masyarakat, dari hasil survey sebesar 56,29% mengatakan bahwa masih terdapat gangguan di aspek ekonomi, 32,45% mengatakan sudah pulih dan 7,95% mengatakan kondisi ekonomi masyarakat saat bencana dan pasca bencana sama saja.

Tabel 36
Pemulihan gangguan di bidang ekonomi setelah program pemulihan

Nilai	Frekuensi	Persentase
Tidak	170	56.29
Ya	98	32.45
Sama Saja	24	7.95

Program pemulihan di bidang ekonomi tidak bisa lepas dari faktor sosial kemasyarakatan, dimana dalam implementasinya masyarakat menjadi objek intervensi pemulihan ekonomi, di dalamnya terdapat kelompok masyarakat di dalam satu wilayah, sehingga terdapat interaksi sosial.

Dalam survey, proses pemulihan aspek ekonomi, masih terdapat gangguan perlindungan sosial, 54,97% responden mengatakan bahwa proses pendistribusian bantuan sosial tidak tepat sasaran sehingga tidak semua kelompok rentan menerima, 34,44% responden menganggap sosialisasi dan akuntabilitas dukungan dan bantuan sosial terbatas atau tidak optimal, 12,91% responden juga berpendapat bahwa program bantuan kurang responsif terhadap warga miskin baru atau kelompok rentan baru akibat bencana, 5,3% responden berpendapat pendaftaran penerima bantuan sosial rumit, warga kurang mendapatkan sosialisasi bantuan sosial tersebut, 2,98% responden juga berpendapat bahwa tempat penerimaan dan distribusi bantuan sosial jauh, sulit dijangkau dan belum mengikuti protokol kesehatan.

Tabel 37
Gangguan terkait perlindungan sosial saat bencana

Nilai	Frekuensi	Persentase
Pendistribusian bantuan sosial tidak tepat sasaran sehingga tidak semua kelompok rentan menerima (ada eksklusi).	166	54.97
Sosialisasi dan akuntabilitas dukungan dan bantuan sosial terbatas.	104	34.44
Program bantuan/ dukungan kurang responsif miskin baru atau kelompok rentan baru akibat bencana.	39	12.91
Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Rumit dan korban bencana kurang mendapat sosialisasi bantuan sosial.	16	5.3
Tempat penerimaan dan Distribusi Bantuan Sosial jauh, sulit dijangkau dan tidak mengikuti Protokol Kesehatan.	9	2.98

Setelah masa tanggap darurat, upaya pemerintah untuk memulihkan aspek ekonomi dilakukan, melalui berbagai program kerja, salah satunya melalui program perlindungan sosial, dari

hasil survey, setelah program pemulihan dijalankan, terdapat 50,00% responden berpendapat belum pulih dan 34,44% berpendapat sudah pulih, sedangkan sebanyak 15,56% berpendapat sebagian saja yang pulih.

Tabel 38
Kepulihan gangguan perlindungan sosial setelah program pemulihan dijalankan

Nilai	Frekuensi	Persentase
Tidak	151	50
Ya	104	34.44
Sebagian	47	15.56

Tabel 39
Program Pemulihan Menurut Responden berdasarkan Survei Rumah Tangga

Aspek	Program Pemulihan Menurut Responden
Aspek Pendidikan	• Sekolah lebih memaksimalkan fasilitas pendukung belajar • Bantuan pendidikan dimaksimalkan sehingga biaya sekolah murah bahkan bisa gratis
Aspek Kesehatan	• Diberikan bantuan kesehatan terhadap masyarakat • Pendataan ulang terhadap masyarakat rentan • Pengobatan gratis dan akses ke fasilitas kesehatan mudahi • Layanan kesehatan lebih baik • Pemerataan data bpjs
Aspek ekonomi	• Butuh modal usaha, butuh dana usaha, diadakan program usaha dan modal, pengadaan modal • Butuh lapangan pekerjaan, mencari pekerjaan yang sulit, membuka lapangan kerja, butuh adanya lapangan pekerjaan, pemerintah melibatkan masyarakat hantap dalam proyek pembangunan, untuk lapangan pekerjaan semoga cepat tersedia dan tidak jauh dari tempat hiburan hunian • Pelatihan UMKM atau skill, gimana sekiranya masyarakat bisa punya skill

	• Pemulihan distributor dan tempat distribusi • Pembangunan pasar • Adanya program khusus bagi lansia • Sistem penyaluran bantuan harus diperbaiki, perlu verifikasi dan validasi data warga terdampak • Lebih baik bantuan sudah di stop. Ganti pelatihan aja • Seharusnya ada dukungan dari pemerintah biar pulih untuk segera ada perekonomian • Lahan pertanian untuk penghuni huntap agar petani tidak kembali ke lahan yg dulu • Butuh adanya penegasan rumah yang sudah tidak ditempati di huntap
--	---

3. Mekanisme Koping

(Positive Coping) Bagaimana upaya pulih dari gangguan akibat bencana :

Tabel 40

Upaya pulih yang positif dari gangguan akibat bencana

Nilai	Frekuensi	Persentase
Menolong diri sendiri dengan koperasi, tabungan, arisan, asuransi dll.	158	52.32
Mengandalkan Bantuan pemerintah, bantuan pihak lain, sumbangan, donasi, dll	149	49.34
Ganti pekerjaan, diversifikasi usaha untuk kurangi risiko, adaptasi cara berusaha dll	65	21.52

Dari table 40 dapat diketahui ternyata upaya pulih yang lebih cenderung tidak merugikan warga terdampak adalah dengan menolong diri dengan koperasi, tabungan, arisan dan asuransi sebesar 52,32 % dari jumlah responden yang dilakukan survey. Upaya pulih berikutnya sebanyak 49,34 % menyatakan lebih mengandalkan bantuan pemerintah, pihak lain, sumbangan dan donasi. Selanjutnya sebanyak

21,52 % responden menyatakan bahwa yang dilakukan adalah dengan mengganti pekerjaannya atau diversifikasi usaha untuk menurangi risiko.

(Negative Coping) Bagaimana upaya pulih dari gangguan akibat bencana :

Tabel 41

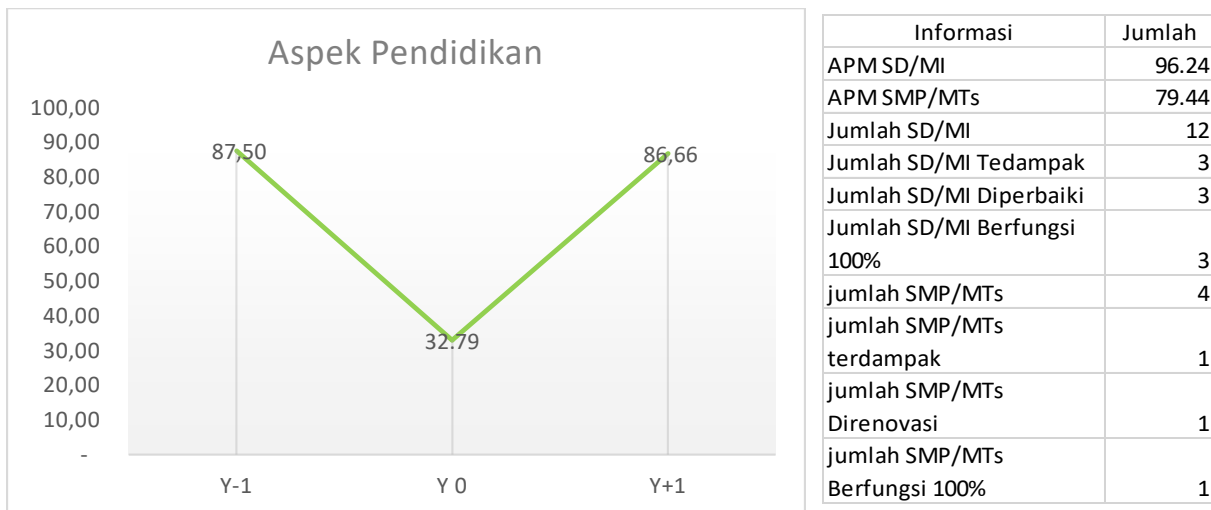
Upaya pulih yang negatif dari gangguan akibat bencana

Nilai	Frekuensi	Persentase
Berhutang dengan berbagai bentuk pinjaman.	167	55.3
Menjual asset, menebang pohon, menjual sapi, Hutang, dll.	141	46.69
Mengurangi konsumsi, tidak ke berobat, anak tidak sekolah, dll	49	16.23
Anak dipekerjakan, anggota keluarga menjadi buruh migrant, dll	6	1.99

Upaya pulih yang memiliki kecenderungan negatif ditunjukkan table 41 dimana warga penyintas yang paling banyak dilakukan adalah dengan berhutang sebanyak 55,3%. Melakukan penjualan asset seperti pohon, sapi sebanyak 46,69%,selanjutnya melakukan pengurangan konsumsi, tidak berobat dan anak tidak sekolah sebesar 16,23 %. Sedangkan ada sebagian kecil yaitu 1,99 % untuk melakukan upaya pulih dengan mempekerjakan anak atau anggota keluarga untuk menjadi buruh migran

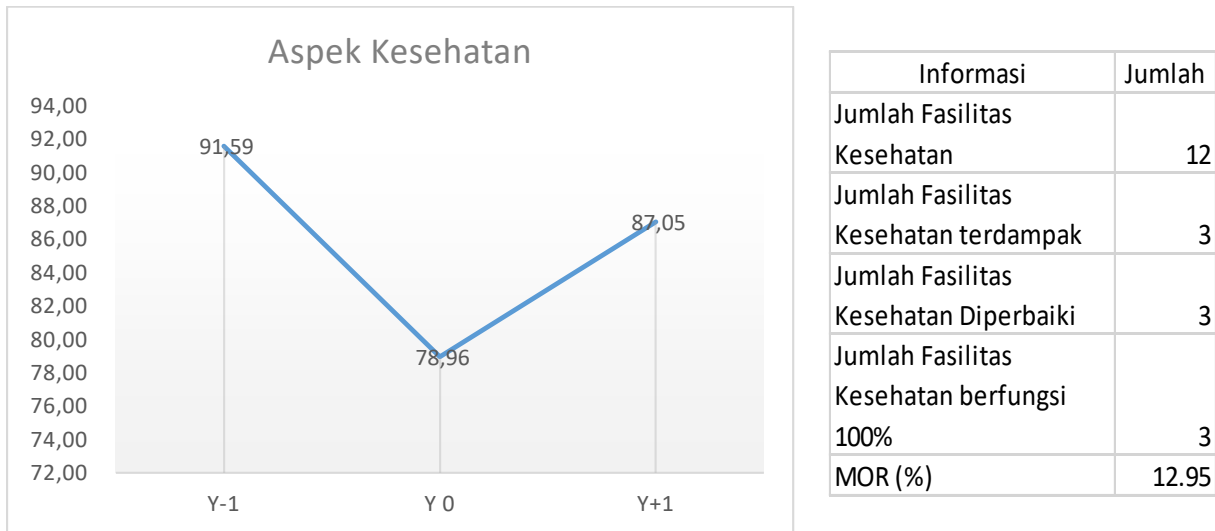
4. Indeks Pemulihan

Setelah dilakukan penghitungan dengan rumus indeks pemulihan maka didapatkan hasil:



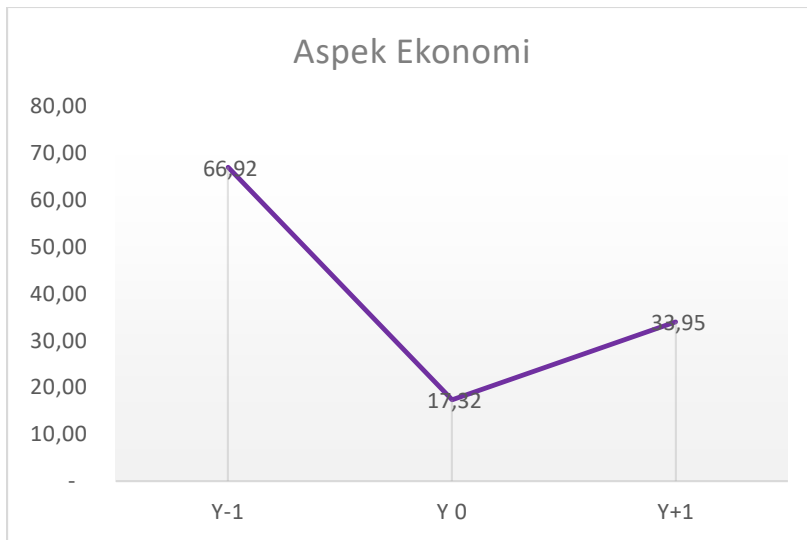
Gambar 19 Indeks pemulihan aspek pendidikan

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada aspek pendidikan yang diukur pada waktu sebelum bencana indeksnya adalah 87,50 dan terjadi penurunan indeks menjadi 32,79 dan setelah dilakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi naik menjadi 86,66. Melihat grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program-program di aspek pendidikan telah menunjukkan tingkat pemulihan yang signifikan. Hal ini juga diperkuat dari hasil survey rumah tangga bahwa untuk aspek pendidikan sebagian besar warga terdampak sudah tidak memiliki keluhan terkait dengan aspek pendidikan.



Gambar 20 Indeks pemulihan aspek kesehatan

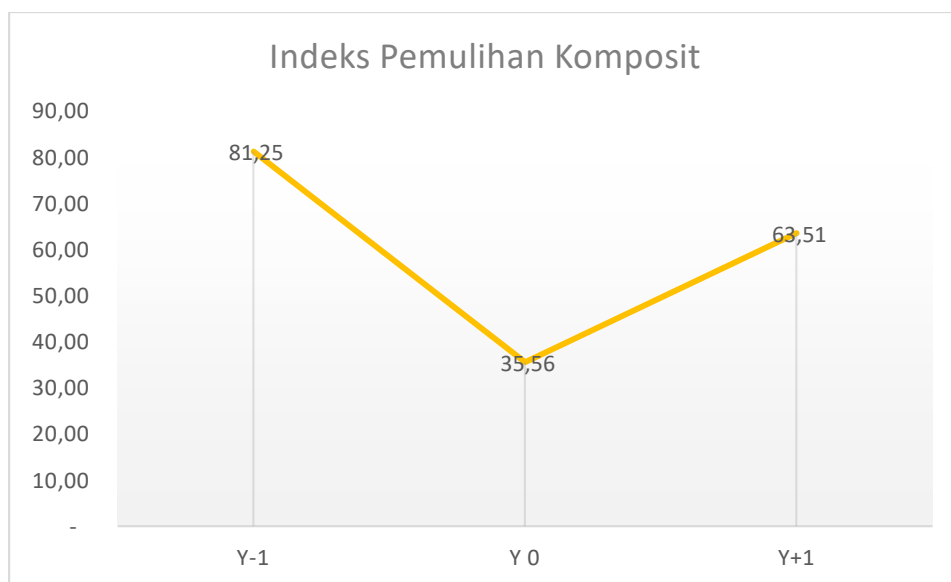
Pada aspek kesehatan menunjukkan bahwa indeks sebelum bencana sebesar 91,59 turun menjadi 78,96 setelah terjadi bencana dan mengalami kenaikan sebesar 87,05 setelah adanya intervensi program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari pengukuran indeks ini aspek kesehatan masih muncul beberapa aspirasi warga pada aspek ini. Seperti contohnya adalah terkait dengan pelayanan BPJS dan bantuan pengobatan



Informasi	Jumlah
Jumlah Fasilitas ekonomi (Unit)	121
TPAK (%)	66.19
Gangguan aset/sarana produksi/tempat kerja (%)	26.16
Kehilangan pekerjaan setelah terjadi bencana (%)	48.68

Gambar 21. Indeks pemulihan aspek ekonomi

Pada grafik di atas menunjukkan untuk aspek Ekonomi pada sebelum bencana menunjukkan Indeks 66,92 dan menunjukkan penurunan indeks sebesar 17,52 pada saat terjadi bencana dan mengalami kenaikan indeks sebesar 33,95 setelah dilakukan intervensi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pada aspek ini tingkat pemulihan sudah mengarah pada situasi indeks sebelum terjadi bencana. Aspek ekonomi ini ternyata sejalan dengan beberapa temuan pada waktu survey rumah tangga dengan banyaknya aspirasi pemulihan di aspek ini. Hal ini dapat ditemukan dengan aspirasi yang masih dibutuhkan warga seperti ; pendataan bantuan supaya lebih tepat sasaran, modal usaha, pekerjaan, kebutuhan tentang pelatihan pertanian dan UMKM



Gambar 22. Indeks pemulihan komposit Ina PDRI

Tabel di atas adalah gambaran indeks pemulihan yang menggabungkan semua aspek penghidupan yaitu ekonomi, kesehatan dan ekonomi. Pada saat terjadi bencana sangat jelas terjadi penurunan indeks sebesar 81,25 dari indeks 35,56 sebelum bencana dan sudah mulai naik setelah dilakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu sebesar 63,51. Grafik di atas dapat dijadikan gambaran bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan belum sepenuhnya selesai. Untuk itu dibutuhkan dukungan program-program pemulihan yang diintegrasikan pada perencanaan dan penganggaran regular pemerintah kabupaten Lumajang.

C. Progres Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Capaian progress pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah terlaksana sampai pada tahun 2023 di 5 sektor yang terdampak bencana Eupsi gunung Semeru adalah sebagai berikut :

1. Sektor Perumahan dan Pemukiman

- Pembangunan Kembali Rumah bagi korban Bencana di lokasi Baru sebanyak 1.951 unit telah terlaksana 100%
- Sarana dan Prasarana Hunian terlaksana 100 %

2. Sektor Infrastruktur

- Penggantian Jembatan Gladak Perak (Besuk Kobokan) telah terlaksana 100%
- Penanganan darurat Pembersihan badan jalan dan Pembangunan Jembatan Gantung pejalan kaki telah terlaksana 100%
- Rekonstruksi jalan Nasional link 062 Ruas BTS Kab Malang- Lumajang dan penggantian 1 Jembatan terlaksana 100%
- Penanganan tanggap darurat bencana dampak awan panas dan guguran gunung semeru di kabupaten Lumajang telah terlaksana 100%
- Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru 4 Desember 2022 di Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan dengan progress 100%

3. Sektor Sosial

- 2 Unit Sekolah sudah diselesaikan dengan progres 100%
- 3 Unit Madrasah sudah diselesaikan 100 %
- Pelayanan dukungan Psikososial telah dilaksanakan dengan progress 100%
- Pelayanan Kesehatan Dokter Muter (FASOP) sudah dilaksanakan dengan progres 100 %

- Pelayanan Maternal Neonatal (KESPRO) telah dilaksanakan 100%
- Edukasi dan Advokasi Promkes (tema PHBS, Prokes) (KESPRO) telah dilaksanakan 100%
- Revitaliasi UKBM (PROMKES) telah dilaksanakan 100%

4. Sektor Ekonomi

- Progam Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian masih belum ada informasi progres yang dilakukan.
- Bantuan Benih yang dilakukan oleh kementerian Pertanian masih dalam progres dengan prosentase sekitar 24 %
- Tanaman Holtikultura belum terlaksana
- Tanaman Perkebunan belum terealisasi
- Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan belum terealisasi
- Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan belum terealisasi
- Pelatihan Budidaya Tanaman Holtikultura belum terealisasi
- Bantuan Peralatan Budidaya sudah terealisasi dengan prosentase 50 %
- Pada subsector peternakan sudah terealisasi bantuan ternak kambing dan sapi termasuk kandang ternak dan HMT (Hijauan Makanan Ternak) dengan prosentase 100%
- Pelatihan pengolahan pakan ternak sudah terealisasi 100%
- Pada subsector pariwisata : Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab. Lumajang sudah terealisasi 100%
- Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar telah terealisasi 100%
- Pada subsector Perindustrian dan Perdagangan : Pelatihan Kemasan Produk IKM, Bantuan Kemasan, Pelatihan Pemasaran Online belum terealisasi
- Sosialisasi dan Fasilitasi Perizinan Berusaha telah terealisasi 100%
- Pembangunan Pasar belum terealisasi
- Pada subsector Koperasi dan Usaha Mikro Pemulihan Ekonomi melalui Kelompok pembuat Struktur Bangunan RISHA, Bantuan Mata Pencapaian dan Transfer Cash Progam belum terealisasi, sementara itu untuk bantuan Usaha Mikro yang terdampak Erupsi Semeru sudah terealisasi 100%,

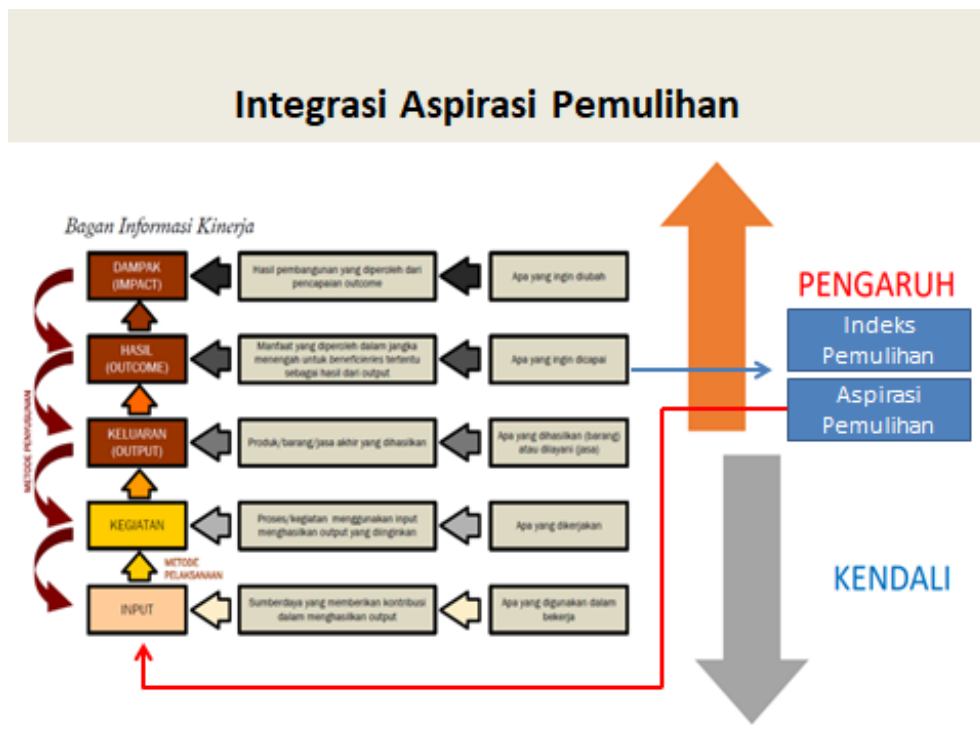
5. Lintas Sektor

- Penyusunan Kajian Resiko Bencana sedang dalam proses reviu peta

- Sosialisasi, komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Erupsi Semeru sudah direalisasikan 100%
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sudah terealisasi 100%
- Penyusunan Rencana Aksi PRB sudah direalisasikan 100 %
- Inisiasi Destana sudah dilakukan 100 %
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana sudah direalisasi 100%
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana sudah terealisasi 100%
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sudah direalisasikan 100 %
- Penyusunan Rencana Kontingensi Semeru (Desa) sudah terealisasi 100 %
- Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana sudah terealisasi 100 %
- Gedung serbaguna (1 Unit) sudah terealisasi 100 %

D. Rekomendasi Program Pemulihan

Untuk merespon aspirasi pemulihan warga terdampak maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang memiliki komitmen untuk memasukkannya ke dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui OPD-OPD yang ada di kabupaten Lumajang. Gambaran pelaksanaan mengacu pada pola perencanaan seperti bagan berikut :



Tabel 42

Bagan Informasi Kinerja dan Integrasi Aspirasi Pemulihan

Dari hasil FGD dengan para pihak terutama pengambil keputusan diperoleh beberapa gagasan dan respon yang berdasarkan aspirasi para penyintas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 43

Aspirasi dan rekomendasi program pemulihan dari penyintas

No	Aspirasi Pemulihan	Kebutuhan Pemulihan	Dinas Terkait
1	Kegiatan belajar belum maksimal	Perlu adanya dukungan tenaga pengajar dan relawan yang melakukan pendampingan belajar	Dinas Pendidikan
2	Masih perlu dukungan untuk memaksimalkan pendidikan seperti beasiswa, keperluan sekolah, sarana dan prasarana	Perlu adanya informasi tentang beasiswa baik swasta maupun pemerintah	Dinas Pendidikan
3	Kebutuhan bantuan terkait dengan aspek kesehatan warga	Bantuan pengobatan gratis	Dinas Kesehatan
4	Perlu ada pendataan tentang aspek kesehatan	Pendataan	Disdukcapil
5	Kebutuhan tentang pengobatan bagi warga yang menderita sakit	Bantuan pengobatan gratis	Dinas Kesehatan
6	Layanan lebih baik kesehatan yang lebih baik	Pelayanan kesehatan ditingkatkan	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan BPJS yang lebih menyasar kepada warga miskin	Pendataan	Disdukcapil

8	Kebutuhan modal usaha warga terdampak	Mengundang stakeholder untuk berinvestasi di sana.	CSR
9	Lahan pertanian untuk penghuni huntap agar petani tidak kembali ke lahan yg dulu	Integral Area Development Pembentukan kelompok tani baru di wilayah huntap untuk mempermudah pembinaan.	Perhutani Dinas Pertanian Peternakan Perikanan
10	Membutuhkan lapangan pekerjaan	Pengolahan hasil SDA di sekitar relokasi Melaksanakan sosialisasi dan keterlibatan pemdes untuk peningkatan ekonomi di bidang kepariwisataan.dan membuka peluang pekerjaan	Disnaker DPMD Pariwisata
11	Pelatihan UMKM dan pengembangan bahan baku lokal	Perlu ada pelatihan dan kursus-kursus UMKM, mengajak penghuni huntap untuk membuat produksi makanan keripik, pisang dll	Dinas Koperasi UMKM Perdagangan

		Pelatihan UMKM Pokir (Jasmes Dewan) untuk UMKM kolaborasi dan koordinasi dengan dewan	
12	Peningkatan skill warga terdampak	Memberi arahan atau masukan pada penyedia pelaksana proyek untuk menjadikan penghuni huntap sebagai pekerja Bimtek penyedia jasa konstruksi	Dinas PU
13	Dukungan program untuk pemberdayaan lansia dan kelompok rentan termasuk disabilitas	Pendampingan lansia sudah jalan dengan program di setiap kecamatan	Dinas Sosial
14	Pelatihan pengemasan, pengepakan, dan pemasaran	Menghimpun paguyuban seni untuk ditampilkan di huntap secara konsisten (Terjadwal) Pelatihan hasil pemasaran dengan media sosial (elektronik)	Dinas Pariwisata Dinas UMKM Kominfo
15	Pasar desa	Pembangunan Pasar desa ④tanah desa kolaborasi dengan desa setempat dan (DPMD)	DPMD
16	Pemberdayaan untuk perempuan dalam bidang ekonomi untuk menambah pendapatan keluarga	Pemulihan ekonomi dan pemanfaatan lahan sempit untuk budidaya ikan di kolam terpal, hasil	Dinas Koperasi UMKM

		panen selain dipasarkan mentah juga diversifikasi produk bisa dikerjakan oleh istri yang merasa menganggur di siang hari	Perdagangan
--	--	--	-------------

E. Penutup

Pelaksanaan Ina-PDRI bencana erupsi gunung Semeru merupakan sebuah kajian untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan upaya untuk menindaklanjuti beberapa program dan kegiatan untuk pemulihan akibat dari bencana tersebut. Berikut ini adalah temuan yang dapat dijadikan proses pembelajaran evaluasi berikutnya :

- Evaluasi outcome yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dirasakan sudah berjalan dengan baik, dalam pelaksanaan kolaborasi dengan pihak swasta dan NGO dalam pembangunan huntera, fasos dan fasum cukup baik.
- Tujuan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum maksimal dikarenakan masih adanya beberapa pelaksanaan pembangunan yang belum selesai.
- Perubahan pada penerima layanan terutama penyintas pada aspek hunian dirasakan sudah cukup layak bahkan lebih baik dari sebelumnya.
- Kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi adalah masih ada catatan terkait dengan kualitas yang belum sesuai dengan perencanaan sehingga membutuhkan waktu lebih untuk penyelesaian.
- Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih perlu adanya koordinasi antar pemangku kebijakan, menyangkut kewenangan dan koordinasi.